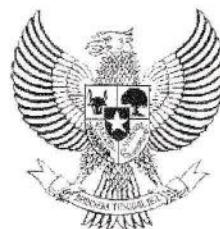


**RENCANA STRATEGIS  
DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TANAH LAUT  
2019 – 2023**



**DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TANAH LAUT  
PELAIHARI  
2019**



**B U P A T I T A N A H L A U T  
P R O V I N S I K A L I M A N T A N S E L A T A N**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 188.45/806 - KUM/2019**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN  
TAHUN 2019 – 2023**

**BUPATI TANAH LAUT,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah di bidang kesehatan perlu disusun Rencana Strategis Dinas Kesehatan;

b. bahwa rencana strategis sebagaimana dimaksud pada huruf a telah disusun sebagai satu dokumen perencanaan indikatif yang membuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2019 – 2023;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

#### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2019 – 2023.

- KEDUA : Rencana Strategis Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam *Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.*
- KETIGA : Rencana Strategis Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA agar dipergunakan sebagai acuan bagi *Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut* dalam penyelenggaraan program pembangunan kesehatan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

ALFIARIAL, SH, MH  
NIP. 19750203 199703 2 006

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal **23 AUG 2019**

**BUPATI TANAH LAUT,**

**Ttd**

**H. SUKAMTA**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS KESEHATAN**

Jalan.H. Boejasin No.9 Pelaihari Telp. ( 0512 ) 21098 Pelaihari

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT**  
**NOMOR : 02.a / DINKES / 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN  
TAHUN 2019 – 2023**

**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT**

- Menimbang :**
- a. Bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan ;
  - b. Bahwa rencana strategis sebagaimana dimaksud huruf a telah disusun sebagai satu Bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan tahun 2019- 2023 di pandang perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan;
  - c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan dimaksud huruf a dan b perlu di tetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Tim Rencana Strategis Dinas Kesehatan tahun 2019 – 2023.

- Mengingat :**
1. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  2. Undang- undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut ;
  6. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023;

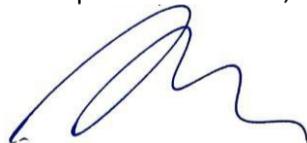
MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Pembentukan Tim Penyusun (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2019 - 2023.

- Pertama : Tim Penyusun (Renstra) Dinas Kesehatan tahun 2019-2023. sebagaimana Diktum Pertama di maksud mempunyai Tugas.
1. Melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat;
  2. Melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Kesehatan;
  3. Melakukan Pengkajian evaluasi renja Dinas Kesehatan tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan;
  4. Melaksanakan Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan;
  5. Melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan;
  6. Melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan Dinas Kesehatan dengan arah rencana pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanah Laut;
  7. Melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan;
  8. Melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu
- Kedua : Susunan Tim Penyusun (Renstra) Dinas Kesehatan tahun 2016-2021 sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2019;;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pelaihari  
Pada Tanggal : 2 Januari 2019

-----  
Plt. Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Tanah Laut,



Hj. Nina Sandra, SKM, MM  
NIP. 196407101985112002

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan

Nomor : **02.a** / DINKES / 2019

Tanggal : 2 Januari 2019

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Sekretaris	Ketua
2	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
3	Kabid Sumber Daya Kesehatan	Anggota
4	Kabid Kesehatan Masyarakat	Anggota
5	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota
6	Kabid Pelayanan Kesehatan	Anggota

Plt. Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Tanah Laut,

  
**Hj. Nina Sandra, SKM, MM**  
NIP. 196407101985112002

## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah laut telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut tahun 2019-2023

Renstra Dinas Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan kabupaten Tanah Laut untuk kurun waktu 2019 – 2023, dengan menekankan pada pencapaian sasaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan prioritas pembangunan bidang kesehatan Pusat dan Provinsi

Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan pembangunan kesehatan makin bertambah berat, komplek dan bahkan tidak terduga. Oleh sebab itu pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan, kerja sama lintas sektoral serta mendorong peran serta aktif masyarakat.

Melalui kesempatan ini kami mengajak kepada semua unsur Dinas Kesehatan untuk saling bekerja sama dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Tanah Laut ini guna mewujudkan visi Kabupaten Tanah Laut "Terwujudnya Tanah Laut yang berinteraksi" (Berkarya, Inovasi, Tertata, Relegius, Aktual, Sinergi)

Semoga upaya kita mendapat Rahmad, Hidayah dan Ridha Nya. Aamiin.

Pelaihari, 23 Agustus 2019  
Plt. Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Tanah Laut

Hj. Nina Sandra, SKM, MM  
NIP. 196407101985112002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN NOMOR :..... TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2014 – 2018 .....	iv
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Hukum .....	3
C. Maksud dan Tujuan .....	5
D. Sistematika .....	6
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN Dinas Kesehatan .....	7
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD .....	7
B. Sumber Daya Kesehatan .....	18
C. Kinerja Pelayanan SKPD .....	22
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD .....	23
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	27
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD .....	27
B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	31
C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kab/Kota .....	32
D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah & Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	33
E. Penentuan Isu-isu Strategis .....	34
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN .....	35
A. Tujuan .....	35
B. Sasaran .....	35

BAB V.	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	.....	40
BAB VI.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	.....	47
BAB VII.	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	.....	49
BAB VIII	PENUTUP	.....	54
LAMPIRAN			

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan Kesehatan adalah bagian dari pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi baik masyarakat, swasta maupun pemerintah. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan diciptakan Visi Kabupaten Tanah, yang merupakan cerminan masyarakat yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat serta memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut sebagai upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia ( SDM ) yang berkualitas dan berdaya saing.

Pembangunan kesehatan daerah yang dilaksanakan secara berkesinambungan telah cukup berhasil meningkatkan derajat kesehatan. Namun demikian derajat kesehatan di Kabupaten Tanah Laut masih terhitung rendah dibandingkan dengan kabupaten lain. Permasalahan utama yang dihadapi adalah masih rendahnya kualitas kesehatan penduduk terutama pada penduduk miskin yang antara lain ditunjukkan dengan masih relatif tingginya angka kematian ibu maternal, kematian bayi, masih relatif tingginya angka kesakitan akibat beberapa penyakit menular serta kecenderungan semakin meningkatnya penyakit tidak menular, masih kurang optimalnya kualitas kesehatan serta akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, belum memadainya jumlah, penyebaran, komposisi dan

mutu tenaga kesehatan dan belum optimalnya alokasi pembiayaan kesehatan untuk penduduk miskin.

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mewajibkan setiap Unit Kerja Perangkat Daerah membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang akan dipergunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selain itu tuntutan masa depan dimana tantangan yang mengarah kepada peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan tugas pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka perlu menyusun Perencanaan strategis sebagai instrumen manajemen publik yang meliputi perumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut ini disusun dengan mengacu pada pendekatan perencanaan yang ditetapkan dalam Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan berpedoman pula pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJM Daerah ) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 - 2023 dan Rencana Strategis Daerah Kabupaten Tanah Laut. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan maupun dengan mendorong peran aktif masyarakat untuk kurun waktu tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut 2018 - 2023 ini selanjutnya dipergunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (

Renja ) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Anggaran Dinas Kesehatan setiap tahunnya sejak tahun 2014 sampai dengan 2018.

## B. Landasan Hukum

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional yang dalam hal ini termasuk pula perencanaan pembangunan di daerah, maka perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional. Sejalan dengan itu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, juga mengamanatkan bahwa dalam perencanaan pembangunan di daerah perlu disusun Rencana Strategis Daerah yang dimuat dalam masing-masing Rencana Strategis SKPD. Selain itu dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut juga didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4483);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran negara nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran negara Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);
13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59

- Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005 – 2025;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
  18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 24 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.

## C. Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

Rencana Strategi ( Renstra ) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut 2014 – 2018 disusun dengan maksud untuk mengoptimalkan peran Dinas Kesehatan dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat dan pembangunan kesehatan daerah, meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam kerangka perwujudan *Good and Clean Governance*.

### 2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis ini adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya Rencana Strategis yang merupakan pedoman untuk meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
2. Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja pembangunan kesehatan di Kabupaten Tanah Laut.

3. Tersusunnya kebijakan yang diperlukan sesuai skala prioritas dalam melaksanakan pembangunan kesehatan daerah.
4. Tersusunnya rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis sesuai bidang kewenangan Dinas Kesehatan.
5. Tersusunnya program-program pembangunan kesehatan daerah.
6. Tersusunnya kegiatan-kegiatan dalam kurun waktu dan pembiayaan.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014

- 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan;

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas kesehatan;

BAB IV Tujuan dan Sasaran;

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII Penutup

Lampiran

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN**

#### **A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Kesehatan**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut berdasar Peraturan Bupati Tanah Laut No. 67 Tahun 2016. Sedangkan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan mempunyai fungsi
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan.
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesehatan.
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan.
  - d. pelaksanaan administrasi dinas.
  - e. pembinaan UPT Dinas.
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja ( SOTK ) Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut.

1. Sekretariat terdiri dari.
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset.
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari.
  - a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat.
  - b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.
  - c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari:
  - a. Seksi Surveilans dan Imunisasi.
  - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.
  - c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
4. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
  - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional.
  - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan.
  - c. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.
5. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :
  - a. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
  - b. Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
  - c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
6. UPT Dinas
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas pokok dan fungsinya Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut:

1. **Sekretariat**
  - a. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan penyusunan perencanaan

program kerja dan anggaran, administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.

- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dinas;
  - b. pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Kesehatan;
  - c. penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Kesehatan;
  - d. penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang kesehatan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
  - e. penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan;
  - f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
  - g. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
  - h. pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kesehatan;
  - i. pengoordinasiaan urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

- k. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Kesehatan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Sekretariat membawahi dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.

- b. Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana keuangan dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan keuangan dan Pengelolaan Aset.

- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

## 2. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kesehatan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja bidang kesehatan masyarakat;
- b. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan,

pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- d. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya

Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi dari :

- a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.

b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait promosi dan pemberdayaan masyarakat.

c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga

Seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.
- b. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
- d. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
- e. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi dari:

- a. Seksi Surveilans dan Imunisasi.

Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait surveilans dan imunisasi.

- b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan

dan pelaksaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

- c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

Seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

#### 4. Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan kesehatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang pelayanan kesehatan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- d. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan

- termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- e. pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi dari :

- a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional.  
Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional.
- b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan.  
Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pelayanan kesehatan rujukan.
- c. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.  
Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksaan

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pelayanan pembiayaan dan jaminan kesehatan.

## 5. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja bidang sumber daya kesehatan.
- b. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan.
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.
- d. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.
- e. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan pkrt serta sumber daya manusia kesehatan.
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- g. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Sumber Daya Kesehatan membawahi dari :

- a. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kefarmasian dan alat kesehatan.

- b. Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fasilitas pelayanan kesehatan.

- c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait sumber daya kesehatan.

## 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan

Kegiatan teknis operasional UPT Dinas adalah melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Kegiatan teknis penunjang UPT Dinas adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.

Kepala UPT Dinas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.

## B. Sumber Daya Dinas kesehatan

Gambaran mengenai situasi sumber daya kesehatan dikelompokkan menjadi Sarana Kesehatan, Tenaga Kesehatan dan Pembiayaan Kesehatan seperti pada uraian berikut :

### 1. SARANA KESEHATAN

#### a. Puskesmas

**Tabel 2.1**  
**JUMLAH PUSKESMAS PEMBANTU DAN PUSKESMAS**  
**KELILING MENURUT KECAMATAN / PUSKESMAS**  
**TAHUN 2016**

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	PUSTU	PUSLING/ AMBULANCE
1	PANYIPATAN	PANYIPATAN	2	2
		BATAKAN	2	2
2	JORONG	JORONG	2	2
		ASAM - ASAM	5	2
3	BATU AMPAR	TAJAU PECAH	7	2
4	KINTAP	KINTAP	3	2
		SEI CUKA	1	2
5	PELAIHARI	PELAIHARI	8	2
		SEI RIAM	1	2
		ANGSAU	1	2
6	BAJUIN	TANJUNG	4	2
		TIRTA JAYA	2	2
7 <sup>A</sup>	TAKISUNG	TAKISUNG	9	2
8	BATI - BATI	BATI - BATI	3	2
p		KAIT - KAIT	1	2
9	TAMBANG	TAMBANG	2	2
10 <sup>a</sup>	KURAU	KURAU	1	2
b		PADANG LUAS	3	2
11 <sup>i</sup>	BUMI MAKMUR	BUMI MAKMUR	2	2
JUMLAH			59	38

a

dilihat dari rasio Puskesmas per 100.000 penduduk terlihat bahwa rasio Puskesmas terhadap penduduk di Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2017 sebesar 5,5 per 100.000 penduduk. Ini berarti pada periode Tahun 2017 setiap 100.000 penduduk rata-rata dilayani oleh kurang lebih 5 unit Puskesmas.

**b. Rumah Sakit**

Indikator yang digunakan untuk menilai perkembangan sarana Rumah Sakit antara lain dengan melihat perkembangan fasilitas perawatan yang biasanya diukur dengan jumlah tempat tidur serta rasionalnya terhadap jumlah penduduk.

Rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk di RSU H. Boejasin Pelaihari pada Tahun 2017 sebesar 46,7 per 100.000 penduduk.

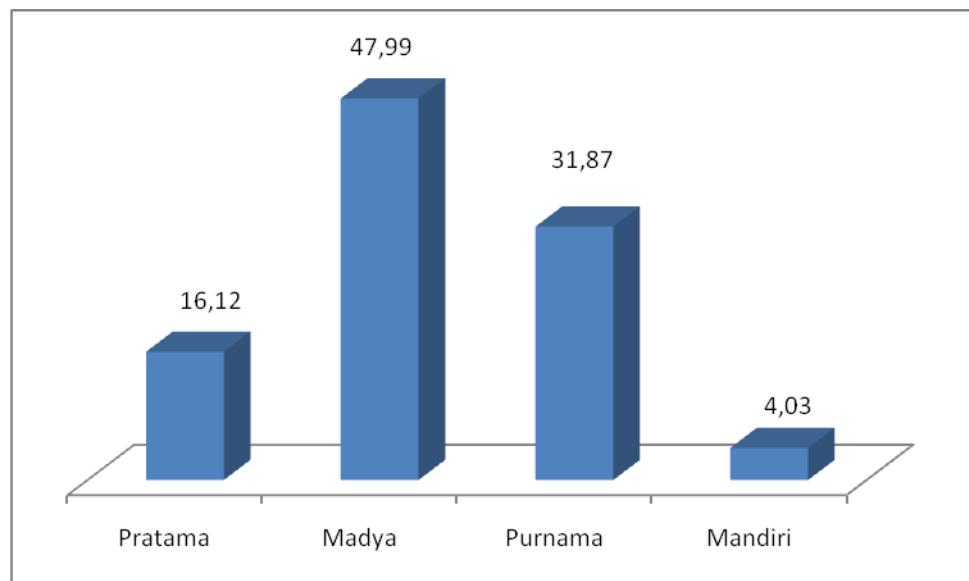
**c. Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat ( UKBM )**

Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat ( UKBM ) di Kabupaten Tanah Laut antara lain Posyandu, Pos Bersalin Desa (Polindes) dan Desa Siaga.

Pada Tahun 2017 jumlah Pos Bersalin Desa ( Polindes ) dan Pos Kesehatan Desa ( Poskesdes ) sebanyak 113 buah, Posyandu sebanyak 274 buah dan Desa Siaga sebanyak 135 desa. Jadi dengan jumlah desa / kelurahan sebanyak 135, maka telah mencapai 100 persen desa siaga.

Perkembangan Posyandu di Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2017 dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik : 2.1**  
**PERSENTASE POSYANDU MENURUT STRATA**  
**KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017**



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa Posyandu dengan strata Purnama sebesar 31,87% sedangkan yang mandiri masih sebesar 4,03%, ini berarti jumlah Posyandu aktif hanya sebesar 35,90%.

## 2. TENAGA KESEHATAN

Informasi tenaga kesehatan diperlukan bagi perencanaan dan pengadaan tenaga serta pengelolaan kepegawaian. Kesulitan dalam memperoleh data ketenagaan yang mutakhir antara lain disebabkan oleh sifat dari data ketenagaan yang selalu berubah dengan cepat dan terus menerus.

Rasio tenaga kesehatan di kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**RASIO TENAGA KESEHATAN**  
**DI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017**

NO	JENIS TENAGA	RASIO	STANDAR
1	Dokter	16,82 per 100.000 pend.	40 per 100.000 pend.
2	Dokter Spesialis	2,9 per 100.000 pend.	6 per 100.000 pend.
3	Dokter Gigi	4,35 per 100.000 pend.	11 per 100.000 pend.
4	Apoteker dan Asisten Apoteker	2,03 per 100.000 pend.	10 per 100.000 penduduk untuk apoteker dan 30 per 100.000 penduduk untuk assisten apoteker.
5	Perawat	96,6 per 100.000 pend.	117,5 per 100.000 pend.
6	Bidan	161,4 per 100.000 pend.	100 per 100.000 pend.
7	Tenaga Gizi	11,3 per 100.000 pend.	22 per 100.000 pend.
8	Tenaga Sanitasi	8,7 per 100.000 pend.	40 per 100.000 pend.
9	Tenaga Kesmas	5,22 per 100.000 pend.	

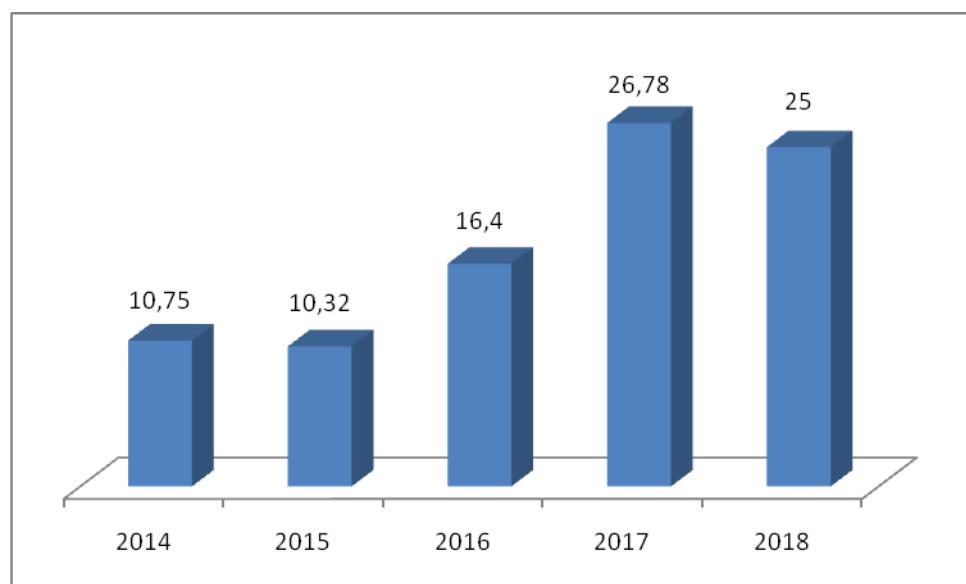
Dari tabel diatas, terlihat bahwa rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk di Kabupaten Tanah Laut sebagian besar masih dibawah standar yang diharapkan, sehingga masih diperlukan upaya pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, yang tentunya melalui analisa kebutuhan tenaga kesehatan.

### **3. PEMBIAYAAN KESEHATAN**

Pembiayaan Dinas kesehatan di Kabupaten Tanah Laut yang bersumber dana APBD pada periode 2014 -2018 sudah diatas 10% dari anggaran belanja daerah, seperti terlihat pada grafik berikut.

**Grafik : 2.2**

**PERSENTASE ANGGARAN KESEHATAN PER TAHUN  
DI KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2011 S.D. 2018**



Pada Tahun 2018 total alokasi anggaran kesehatan pemerintah baik bersumber APBD maupun APBN sebesar Rp. 323.111.352.305,- dibandingkan jumlah penduduk Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018, dan bila dibandingkan dengan APBD Kabupaten Tanah Laut tahun 2018 sebesar Rp. 1.310.590.612.551,- maka anggaran bidang kesehatan sudah mencapai 25 % sudah melebihi anggaran minimal yang diamanatkan dalam undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan minimal sebesar 10%.

#### **C. Kinerja Pelayanan SKPD**

Derajat kesehatan masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi satu sama lain. Status kesehatan masyarakat diukur

melalui angka kesakitan penyakit (morbidity) dan angka kematian (mortality) serta peningkatan umur harapan hidup (*Life Expectancy*). Berbagai upaya yang dilakukan secara terpadu untuk menekan kesakitan pada penyakit tertentu dan kematian pada bayi, balita dan ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas.

Pada dasarnya upaya penurunan jumlah bayi lahir mati, jumlah kematian neonatus, jumlah kematian bayi, kematian balita, kematian ibu melahirkan (maternal) dan upaya program / kegiatan kesehatan lainnya terus dilakukan untuk menekan angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi dan Anak sesuai dengan target Rencana Strategis Dinas kesehatan Tahun 2014 – 2018.

Untuk melihat gambaran derajat kesehatan masyarakat / kinerja pelayanan dan realisasi keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel T-C.23 terlampir.

Untuk Anggaran biaya pembangunan bidang kesehatan serta capaiannya dapat dilihat pada tabel T-C.24 terlampir

- D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas kesehatan
- Berdasarkan analisis berbagai aspek dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Tanah Laut maka dapat diidentifikasi faktor-faktor Peluang dan tantangan sebagai berikut :
- 1) Peluang
    - a) Undang-Undang RI nomr 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
    - b) Adanya Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

- c) Adanya Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran
- d) Adanya Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang system Jaminan Sosial Nasional dan terbentuknya Badan Pelaksana Jamiran Sosial tahun 2014.
- e) Kesepakatan para Bupati dan Walikota tanggal 28 Juli 2000 untuk menyediakan alokasi dana kesehatan minimal 15% dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau 5% dari Pendapatan Domestik Bruto.
- f) Tersedianya fasilitas Pelayanan kesehatan yang memadai.
- g) Adannya Kelompok Kerja Operasional bidang kesehatan seperti Pokjanal Posyandu.
- h) Adanya sumber dana untuk kesehatan yang berdumber masyarakat melalui program JPKM, Dana Sehat, Dana Sosial Ibu Bersalin, beras perelek/jimpitan, dana kematian dll.
- i) Adanya pertemuan rutin di desa seperti pertemuan mingguan di desa, pengajian/majelis ta'lim.
- j) Adanya Kader kesehatan.
- k) Bertambahnya fasilitas pelayanan / klinik pelayanan kesehatan swasta
- l) Tersedianya peralatan kesehatan dan penunjang kesehatan yang cukup memadai.
- m) Terpenuhinya kebutuhan obat di fasilitas pelayanan kesehatan Dasar dan Rujukan.
- n) Tersedianya tenaga kesehatan yang memadai.
- o) Tersedianya alokasi anggaran yang cukup melalui APBD maupun APBN
- p) Meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.

q) Adanya partisipasi masyarakat/swasta dalam pembangunan kesehatan.

2) Tantangan

- a) Terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama pada kelompok rentan seperti masyarakat miskin.
- b) Pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai standar masih terbatas
- c) Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh
- d) Masih adanya kematian akibat penyakit menular dan tidak menular.
- e) Meningkatnya Usia harapan hidup mengakibatkan meningkatnya jumlah usia lanjut sehingga menjadi kelompok rentan terhadap masalah kesehatan.
- f) Maraknya makanan jajanan yang mengandung zat berbahaya yang pada akhirnya menimbulkan masalah kesehatan,
- g) Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan pola hidup bersih dan sehat masih kurang sehingga bisa menimbulkan permasalahan kesehatan masyarakat
- h) Sistem informasi kesehatan yang masih lemah, keterbatasan data menjadi kendala dalam pemetaan masalah dan penyusunan kebijakan

3) Kekuatan

- a) Puskesmas sudah melaksanakan perencanaan sendiri (Rencana Kerja Anggaran) sehingga penanganan permasalahan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas akan lebih efektif dan efisien.
- b) Hampir semua Kecamatan sudah dibangun Puskesmas, untuk membantu pelayanan di wilayah kerja Puskesmas diperkuat dengan Puskesmas Pembantu, Pusling, Poskesdes/Polindes, Posyandu, dan Usaha Kesehatan Berbasis masyarakat lainnya.

- c) Adanya Standar Operating Procedure (SOP) pelayanan kesehatan di Puskesmas
- d) Adanya dukungan, kerja sama dan kemitraan lintas program dan lintas sector tingkat kecamatan.
- e) Adanya system informasi manajemen Puskesmas yang bersumber dari system pencatatan dan pelaporan Puskesmas.

4) Kelemahan

- a. Upaya kesehatan masih menitik beratkan pada usaha kuratif dan rehabilitative belum menitik beratkan pada preventif dan promotif.
- b. Kegiatan yang dilaksanakan Puskesmas kurang berorientasi pada masalah dan kebutuhan kesehatan masyarakat setempat.
- c. Mutu dan penampilan fisik Puskesmas kurang bersih dan nyaman serta disiplin, profesionalisme, keramahan petugas masih lemah.
- d. sumber daya manusia di Puskesmas masih kurang dan tidak merata.
- e. Jumlah kader kesehatan masih kurang dan tingginya drop out kader, kurangnya penghargaan atas kerja kader serta sulitnya mencari kader baru.
- f. Lemahnya koordinasi dengan lintas sektor dan lemahnya Puskesmas dalam menggali dan mengorganisasi partisipasi masyarakat dan kemitraan dengan sector lain maupun swasta.

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD**

Angka Kematian ibu di Kabupaten Tanah laut yang pada tahun 2017 mencapai 16 per 100.000 walaupun masih dibawah target target SDGs adalah 70 per 100.000 kelahiran hidup, tapi hal ini menggambarkan kondisi pelayanan kesehatan yang masih belum maksimal walaupun kontak antara petugas kesehatan dengan ibu hamil sudah tinggi terlihat dengan cakupan K4 pada tahun 2017 mencapai 77,2%.

Angka kematian bayi pada tahun 2017 mencapai 14 per 1.000 kelahiran hidup terlihat masih di atas target SDGs yaitu 12 per 1.000 kelahiran hidup, jadi ini masih merupakan masalah kesehatan di Kabupaten tanah laut. salah satu penyebabnya adalah rendahnya capaian rata-rata Standar Pelayanan Masyarakat bidang kesehatan yaitu sebesar 59,23% untuk itu perlu usaha yang keras dan penggalangan komitmen dalam rangka peningkatan SPM tersebut disamping pembiayaan yang cukup.

Masih adanya Pernikahan dini (Usia Remaja) diamana reproduksi wanita belum siap dan banyaknya remaja hamil diluar nikah bisa juga merupakan salah satu faktor penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi. Hal ini mengakibatkan remaja menjadi kelompok yang rentan akan suatu penyakit disamping kelompok rentan lainnya seperti usila, keluarga miskin dll.

Kasus gizi buruk tahun 2017 tidak ada bila dibanding tahun 2016 sebanyak 2 orang. Namun hal ini perlu diwaspadai hasil survei pemantauan Gizi masyarakat prevalensi gizi kurang sebesar 6,9% dan bayi yang ditimbang dibawah garis merah sebesar 2,31%.

Penularan infeksi penyalit menular utama (AIDS/HIV, TBC dan Malaria) masih merupakan masalah kesehatan masyarakat. Jumlah kasus HIV Tahun 2017 ada 3 orang (target < 5), prevalensi kasus TB tahun 2017 sebesar 115 / 100.000 penduduk (target : 200/100.000), Angka penemuan kasus Malaria tahun 2017 sebesar 0,21/1.000 penduduk (Target 0,5/1.000)

cakupan Universal Child Immunization (UCI) desa tahun 2017 walaupun sudah mencapai 94,7% akan tetapi 5,3% berpotensi timbulnya kasus-kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi sehingga dapat menimbulkan wabah, untuk itu perlu upaya-upaya untuk meningkatkan cakupan Imunisasi.

Maraknya makanan jajanan yang mengandung zat berbahaya atau tidak higienis yang pada akhirnya menimbulkan masalah kesehatan, untuk itu perlu kerja keras dalam pengawasan tempat-tempat penjual makanan, dari hasil pengawasan tempat makanan di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2017 hanya 14,72% yang memenuhi persyaratan kesehatan

Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan pola hidup bersih dan sehat masih kurang sehingga bisa menimbulkan permasalahan kesehatan masyarakat seperti masih tingginya penyakit menular dan masuknya penyakit tidak menular dalam 10 penyaklit terbesar di Kabupaten Tanah Laut seperti hipertensi yang merupakan urutan

pertama dari sepuluh penyakit terbanyak di Kabupaten Tanah laut.. Untuk itu perlu peningkatan di bidang promotif dan preventif dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan.

Meningkatnya populasi usia lanjut meningkat dan termasuk kelompok yang rentan akan resiko suatu penyakit sehingga perlu perhatian khusus untuk meningkatkan dan menjaga kesehatan kelompok rentan terhadap resiko penyakit.

Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar sudah meningkat yang ditandai dengan meningkatnya jumlah puskesmas, dibentuknya poskesdes dan dijaminnya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin, namun akses terhadap pelayanan kesehatan belum disertai meningkatnya Kualitas mutu pelayanan disebabkan kurangnya SDM, sarana prasarana dan fasilitas pelayanan kesehatan yang kurang memadai / tidak sesuai standar kesehatan (Permenkes nomor 75 tahun 2014) disamping Sistem informasi kesehatan yang masih lemah, keterbatasan data serta rendahnya kualitas penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (SAKIP) menjadi kendala dalam pemetaan masalah dan penyusunan kebijakan serta pengawasan program kegiatan yang berjalan. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel T-B.35  
 Tabel Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
 Pembangunan Daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1	Rendahnya Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu masih tinggi	Capaian SPM pelayanan kesehatan keluarga masih rendah Bayi lahir dengan berat badan rendah masih tinggi meningkatnya pernikahan dini,
		Prevalensi gizi kurang / stunting masih ada	Capaian pemantauan gizi masyarakat masih rendah Lemahnya kerja sama Lintas Sektor yang terkait dalam bidang pembangunan kesehatan
		Kurang mandirinya masyarakat dalam penanganan masalah kesehatan.	Capaian Rumah Tangga berperilaku hidup bersih dan sehat masih rendah Rendahnya capaian desa ODF
		Tingginya prevalensi Penyakit menular dan mulai meningkatnya penyakit tidak menular	Capaian SPM Penyakit menular dan tidak menular masih rendah kualitas kesehatan lingkungan rendah ditandai dengan masih tingginya kasus KLB penyakit menular yang disebabkan lingkungan yang buruk. Pengawasan obat dan makanan serta tempat tempat umum kurang maksimal. kesadaran masyarakat dalam pencegahan penyakit masih kurang.
		Kualitas pelayanan di Fasilitas pelayanan Kesehatan belum optimal	Hanya 48% Puskesmas terkareitasi. Indeks Kepuasan masyarakat (3,2) nilai belum maksimal. Terbatasnya SDM yang berkompetensi Fasilitas kesehatan yang belum standar sesuai permenkes 75 tahun 2014. Sistem informasi kesehatan yang masih lemah dan keterbatasan data Rendahnya kualitas penyelenggaraan SAKIP Daerah

## **B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi Pembangunan Kabupaten Tanah Laut 2019 – 2023 adalah Terwujudnya Tanah Laut yang berinteraksi (Berkarya, Inovasi, Tertata, Relegius, Aktual, Sinergi)

Misi :

### **1. Berkarya**

Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya :

- a. Berkarya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
- b. Berkarya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
- c. Berkarya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi

### **2. Inovasi**

Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif :

- a. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat
- b. Berinovasi untuk melahirkan industri kreatif.

### **3. Tertata**

Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance):

- a. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
- b. Menerapkan prinsip-prinsip orang yang tepat dan cerdas pada jabatan yang selaras di dalam pemerintahan

#### 4. Religius

meningkarkan kualitas dan kuantitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan kehidupan masyarakat:

a. Religius dalam penyelenggaraan pemerintah daerah

b . Meningkatkan kualitas dan kuantitas kehidupan beragama

#### 5. Sinergi

Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat:

a. Membangun sinergitas yang baik dengan pemerintah pusat, provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten /Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

b. Meningkatkan sinergitas dengan pemerintah desa, kelurahan dan kecamatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

### C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kab/Kota

Tujuan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu meningkatnya status kesehatan masyarakat dan meningkatnya daya tanggap (*responsiveness*) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (*life cycle*), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, tentunya sejalan dengan visi Kepala Daerah Kabupaten Tanah Laut yang terpilih dan juga sejalan dengan misi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, dimana bidang kesehatan juga akan meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat sehingga diharapkan akan mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Visi Pemerintah provinsi Kalimantan selatan adalah **Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing.**" Visi tersebut mengandung makna bahwa kondisi Kalsel pada Tahun 2021 berada dalam kondisi mapan, yang berarti (baik, tidak goyah, stabil).

Dengan visi Gubernur tersebut diharapkan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mampu mendorong pembangunan berwawasan kesehatan dan kemandirian masyarakat dalam mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan berperilaku sehat serta mampu menggerakkan semua potensi yang ada dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang merata dan bermutu bagi semua penduduk, guna memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, sebagai perwujudan hak asasi manusia di bidang kesehatan.

Dalam pembangunan bidang kesehatan pemerintah provinsi akan **Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani** dengan Indikator tercapainya tujuan ini pada tahun 2021 adalah :

- 1) Meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH)
- 2) Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI)
- 3) Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)
- 4) Seluruh Kabupaten/Kota melakukan pembinaan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular.

#### **D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah & Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Setiap pembangunan tentu ada dampak negatifnya karena itu perlu perencanaan dan tata ruang dan wilayah seperti yang sudah dilakukan Kabupaten Tanah Laut dengan membuat tata wilayah dengan zona tertentu seperti zona pertanian/perkebunan, zona Industri berat dan ringan dan lain-lain tentunya semua itu dilandasi dengan pengkajian

lingkungan hidup strategis, sehingga diharapkan setiap pembangunan dilandasi tata ruang dan kajian lingkungan hidup dan berwawasan kesehatan sehingga dampak negative dari pembangunan dapat diminimalisir dan khususnya tidak menurunkan derajat kesehatan masyarakat

#### E. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan permasalahan yang ada maka isu-isu strategis bidang kesehatan adalah sebagai berikut :

- a) Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu masih tinggi
- b) Penurunan Prevalensi gizi kurang / stunting belum optimal
- c) Kurang mandirinya masyarakat dalam penanganan masalah kesehatan.
- d) Tingginya prevalensi Penyakit menular dan mulai meningkatnya penyakit tidak menular
- e) Kualitas pelayanan di Fasilitas pelayanan Kesehatan belum optimal

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas kesehatan**

##### **A. Tujuan**

Terdapat dua tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2019-2023, yaitu: meningkatkan status kesehatan masyarakat dan meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan. Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan (*life cycle*), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia.

Tujuan indikator Dinas Kesehatan bersifat dampak (*impact atau outcome*). dalam Meningkatkan status kesehatan masyarakat, indikator yang akan dicapai adalah

1. Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup dengan target dari capaian sekarang 16 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 10 per 100.000 kelahiran hidup.

2. Angka kematian bayi per 1000 Kelahiran hidup dengan target dari 89 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup

3. Prevalensi Gizi stunting dengan target dari 25% menjadi 20%

Sedangkan dalam rangka Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan maka indikator yang akan dicapai adalah:

1. Indeks Keluarga Sehat dengan target 0,8

2. Indeks kepuasan masyarakat dengan target dari 3,2 menjadi 3,8

## B. Sasaran

Sasaran Strategis Dinas kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak serta gizi masyarakat dengan indikator sasaran yang akan dicapai adalah :
  - a. Angka Kematian Ibu dengan target akhir Renstra sebesar 10 per 100.000 Kelahiran Hidup
  - b. Angka Kematian Bayi dengan target akhir Renstra sebesar 9,2 per 1000 kelahiran hidup
  - c. Prevalensi Gizi stunting dengan target akhir Renstra sebesar 20%
  - d. Persentase Ibu Hamil yang dilayani sesuai Standar dengan target akhir Renstra sebesar 100%
  - e. Persentase ibu bersalin yang dilayani sesuai Standar dengan target akhir Renstra sebesar 100%
  - f. Persentase Bayi Baru Lahir yang dilayani sesuai Standar dengan target akhir Renstra sebesar 100%
  - g. Persentase Balita yang mendapat pelayanan gizi sesuai Standar dengan target akhir Renstra sebesar 100%
2. Meningkatnya Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat dengan indikator sasaran yang akan dicapai adalah :
  - a. Persentase Rumah Tangga berPHBS dengan target akhir Renstra sebesar 60%
  - b. Persentase Desa yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat dengan target akhir Renstra sebesar 100%
3. Meningkatnya Kesehatan Lingkungan, dengan indikator sasaran yang akan dicapai adalah

- a. Persentase desa STBM dengan target akhir Renstra sebesar 100%
  - b. Persentase TTU yang memenuhi syarat Kesehatan dengan target akhir Renstra sebesar 80%
  - c. Persentase TPM yang memenuhi Syarat Kesehatan dengan target akhir Renstra sebesar 70%
4. Meningkatnya Kesehatan Kerja dan Olah Raga, dengan indikator sasaran yang akan dicapai adalah
- a. Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja dan olah raga dengan target akhir Renstra sebesar 100%
5. Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak menular dengan indikator sasaran yang akan dicapai adalah :
- a. Persentase orang dengan penyakit Tidak Menular yang dilayani sesuai standar dengan target akhir Renstra sebesar 100%
  - b. Persentase Desa bebas KLB Penyakit Menular dengan target akhir Renstra sebesar 100%
  - c. Persentase Desa Universal Child Immunization (UCI) dengan target akhir Renstra sebesar 100%
6. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dengan indikator sasaran yang akan dicapai adalah :
- a. Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target akhir Renstra sebesar 3,8
  - b. Indeks Keluarga Sehat dengan target akhir Renstra sebesar 0,8
  - c. Persentase fasilitas Kesehatan yang terakreditasi Utama dengan target akhir Renstra dengan target akhir Renstra sebesar 68%

- d. Persentase Pelayanan kegawat daruratan oleh Public Service Center (PSC) dengan target akhir Renstra sebesar 100%
  - e. Persentase Fasilitas Kesehatan yang berstatus BLUD dengan target akhir Renstra sebesar 100%
  - f. Persentase Desa dengan IKS katagori Sehat dengan target akhir Renstra sebesar 50%
  - g. Persentase Jumlah Kelompok Asuhan Mandiri Tanan Obat Keluarga (Asman TOGA) di Desa dengan target akhir Renstra sebesar 56%
  - h. Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta JKN dengan target akhir Renstra sebesar 100%
7. Meningkatkan Fasilitas Pelayanan kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan indikator sasaran yang akan dicapai adalah :
- a. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai Standar dengan target akhir Renstra sebesar 80%
  - b. Persentase Puskesmas dengan alat Kesehatan yang standar dengan target akhir Renstra sebesar 100%
  - c. Persentase obat dan BMHP yang sesuai Formularium Nasional dengan target akhir Renstra sebesar 100%
  - d. persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar dengan target akhir Renstra sebesar 100%
8. Meningkatnya pelayanan administrasi dan Dukungan Operasional Perkantoran dengan indikator sasaran yang akan dicapai adalah :
- a. Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran dengan baik dan sesuai aturan dengan target akhir Renstra sebesar 100%

- b. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran sesuai standar dengan target akhir Renstra sebesar 100%
- c. Persentase Pelayanan Kepegawaian sesuai aturan dengan target akhir Renstra sebesar 100%
- d. Persentase Pencatatan dan Pelaporan Keuangan sesuai standar dengan target akhir Renstra sebesar 100%
- e. Persentase Pencatatan aset sesuai standar dengan target akhir Renstra sebesar 100%
- e. Nilai Laporan Akuntabilitas kinerja Pemerintah (LAKIP) dengan target akhir Renstra sebesar 74

Adapun Tujuan dan sasaran rencana strategis yang lebih rinci dapat dilihat pada tabel T-C.25 terlampir

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2015-2019 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025, yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya Umur Harapan Hidup, menurunnya Angka Kematian Bayi, menurunnya Angka Kematian Ibu, menurunnya prevalensi gizi kurang/stunting pada balita.

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025, dan disandingkan dengan visi dan misi Bupati Tanah laut dimana Dinas kesehatan berkewajiban dalam misi I yaitu Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, maka Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kesehatan kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel T-C.26**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<p><b>VISI :</b> Terwujudnya Tanah Laut yang berinteraksi (Berkarya, Inovasi, Tertata, Relegius, Aktual, Sinergi)</p> <p><b>MISI I :</b> Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak serta gizi masyarakat	<p>Optimalisasi Pelayanan kesehatan primer dibangun dengan mengedepankan upaya kesehatan ibu dan anak, serta untuk mengatasi penyakit-penyakit lain penyebab kematian ibu dan anak.</p>	<p>Penguatan komitmen Lintas Program / Lintas Sektor dalam melaksanakan program kegiatan mengedepankan upaya kesehatan ibu anak dan Keluarga Berencana</p>
			<p>Peningkatan pelayanan Kesehatan ibu dan anak melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, kunjungan dokter spesialis ke Puskesmas.</p>
		<p>Optimalisasi pengembangan sistem surveilans (pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi serta penyebaran data secara sistematis dan berkelanjutan), monitoring dan evaluasi yang memberdayakan peranan masyarakat lokal</p>	<p>memperkuat sistem surveilans kematian ibu anak serta monitoring secara berkelanjutan</p>
		<p>Optimalisasi penanganan gizi buruk Fokus pada penanggulangan KEK (kekurangan energy kronis) ibu hamil dan gizi kurang/buruk pada balita.</p>	<p>Penanggulangan KEK dan Balita Kurang Gizi</p> <p>memperkuat sistem surveilans kasus gizi buruk, monitoring dan evaluasi serta dilaksanakannya pemetaan status gizi masyarakat</p>
			<p>Memperkuat kelembagaan yang ada dalam pemantauan status gizi masyarakat</p>
	Meningkatnya Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	Optimalisasi kegiatan advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	<p>Penguatan Kerjasama Lintas sektor, swasta, LSM yang dapat mendukung pembangunan bidang</p>

		<p>kesehatan</p> <p>peningkatan penyuluhan melalui media penyuluhan secara konvensional dan elektronik/melalui sosial media</p> <p>Peningkatan Kapasitas/Pelatihan Kader Kesehatan, membuat percontohan desa sehat (PHBS)</p>
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan	Optimalisasi Program kesehatan lingkungan	<p>Penguatan Kerja sama Lintas Sektor dan Program, swasta, LSM. Pembinaan Kelompok Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah raga, Peningkatan Pelayanan Kesehatan olah raga seperti tes kebugaran untuk institusi maupun masyarakat, memanfaatkan Media sosial untuk optimalisasi Penyuluhan dan pemberdayaan Upaya Kesehatan Lingkungan</p>
		<p>Peningkatan peran Puskesmas dalam pencapaian kecamatan/kabupaten Stop Buang Air Besar Sembarang (SBS)</p> <p>Peningkatan cakupan TPM Sehat, TTU Sehat dan RS yang melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar</p>

Meningkatnya Kesehatan Kerja dan Olah raga	Fasilitasi dan Pembinaan kepada Puskesmas untuk melaksanakan kegiatan Upaya Kesehatan Kerja Penyelenggaraan program kesehatan kerja dan olahraga secara bertahap terpadu dan berkesinambungan berdasarkan kebutuhan masyarakat.	Mendorong dan memfasilitasi kepada semua Puskesmas untuk melaksanakan pembentukan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK), Pemberdayaan masyarakat dalam implementasi Kesehatan kerja dan olah raga, Advokasi dan sosialisasi Kesehatan kerja dan olah raga (Pemda, dunia usaha, lintas program, lintas sektor, dll)
Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	optimalisasi Promosi pencegahan, dan pengurangan faktor risiko PTM melalui pemberdayaan masyarakat	Penguatan Advokasi ke penentu kebijakan untuk meningkatkan pendanaan dan multi sektor, peningkatan kerjasama LS dan Pelaksanaan Bimbingan teknis dan manajemen ke Fasilitas pelayanan Kesehatan  penguatan aktifitas Posbindu PTM
	Optimalisasi pelayanan kesehatan Penyakit tidak menular, serta kolaborasi sektor swasta dan profesional	Peningkatan kapasitas bagi petugas dan kader kesehatan, serta pelaksanaan pemeriksaan PTM melalui kolaborasi swasta dan profesional
	Penguatan surveilans, pengawasan PTM	Meningkatkan Pelaksanaan surveilans faktor risiko PTM yang terintegrasi (melibatkan LS/LSM/Swasta) serta memperkuat aktifitas Posbindu PTM

		Perluasan cakupan akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan terkait penyakit menular.	Peningkatan skrining cepat bila ada dugaan potensi meningkatnya kejadian penyakit menular seperti Mass Blood Survey untuk malaria
		Intensifikasi penemuan kasus Penyakit Menular/Perluasan skrining dan Deteksi Dini Kasus Penyakit Menular	Perluasan skrining, deteksi dini Penyakit menular dengan sasaran ibu hamil, populasi kunci/ kelompok masyarakat berisiko tinggi
		Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam membantu upaya pengendalian penyakit	Peningkatan keterlibatan LS/LP/LSM dan masyarakat dalam upaya penemuan/deteksi dini Penyakit Menular dan melalui surveilans berbasis masyarakat untuk melakukan pengamatan terhadap kejadian penyakit menular
		Optimalisasi Pengendalian Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)	Penyelenggaraan Imunisasi dilaksanakan oleh Puskesmas, swasta dan masyarakat, dengan prinsip keterpaduan
			Peningkatan kualitas pelayanan imunisasi melalui; <ul style="list-style-type: none"> <li>– Petugas yang terampil</li> <li>– Coldchain dan vaksin yang berkualitas</li> <li>– Pemberian imunisasi yang benar</li> </ul>
Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Primer	peningkatan Pembinaan dan kapasitas Puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan Kesehatan primer

		Mendorong Puskesmas agar lebih aktif dalam melaksanakan kegiatan Kesehatan primer melalui pendekatan keluarga
		Mendorong Puskesmas agar mampu melaksanakan pelayanan pengobatan alternatif melalui pelayanan kesehatan tradisional yang bermutu dan berkualitas
	Optimalisasi pelayanan kesehatan Rujukan.	Peningkatan Pembinaan dan monitoring Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah maupun swasta
		Mendorong dan memfasilitasi semua fasilitas Pelayanan Kesehatan agar terakreditasi Madya
		Meningkatkan pelayanan Kesehatan Tanggap Bencana Bagi Masyarakat (termasuk Pelayanan Kesehatan on Call)
		Memberikan Pelayanan pembiayaan dan jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum masuk keanggotaan BPJS
Meningkatkan Fasilitas Pelayanan kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Menjamin Fasilitas Pelayanan Kesehatan masyarakat yang merata dan bermutu	Menyediakan dukungan kefarmasian/ obat-obatan/bahan medis habis pakai dan alat kesehatan serta pemeliharaan/kalibrasi alat kesehatan

		Peningkatan Fasilitas Kesehatan dengan Membangun/mengada kan/memperbaiki, meningkatkan mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan termasuk sarana dan prasarana secara merata dan sesuai standar kesehatan yang berlaku
		Meningkatkan kapasitas dan pemerataan Sumber daya manusia kesehatan
Meningkatnya Administrasi dan Dukungan Operasional Perkantoran	Menjamin meningkatnya Pelayanan Administrasi perkantoran dan dukungan operasional perkantoran	Menjamin dukungan manajemen dan operasional fasilitas pelayanan kesehatan

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Tujuan Pembangunan bidang Kesehatan yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dengan indikator Tujuan yang harus dicapai selama lima tahun adalah:

1. Menurunnya angka kematian ibu dari 16 per 100.00 kelahiran hidup menjadi 10 per 100.000 kelahiran hidup.
2. Menurunnya angka kematian bayi dari 89 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup
3. Menurunkan prevalensi stunting dari 25% menjadi 20%
4. Persentase Keluarga Sehat dari 14% menjadi 50%
5. Indeks kepuasan masyarakat dari 3,2 menjadi 3,8

Untuk mencapai tujuan tersebut Pelayanan Kesehatan Dasar merupakan langkah awal yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan pemberian pelayanan kesehatan dasar secara cepat dan tepat, diharapkan sebagian besar masalah kesehatan dapat diatasi.

Program pelayanan dasar tersebut adalah :

1. Promosi Kesehatan
2. Kesehatan Lingkungan
3. Pencegahan Pemberantasan Penyakit
4. Kesehatan keluarga dan Reproduksi
5. Perbaikan Gizi Masyarakat
6. Penyembuhan Penyakit dan Pelayanan Kesehatan

Disamping program diatas Dinas kesehatan dalam melaksanakan pembangunan bidang kesehatan yang teknisnya dilaksanakan oleh UPT

Dinas kesehatan juga melaksanakan program pelayanan pengembangan seperti Upaya kesehatan gigi masyarakat, Kesehatan tradisional, Kesehatan mata dan lain-lain sesuai dengan permasalahan yang ada di tiap wilayah kerja UPT masing masing. tentunya kesemua program diatas adalah yang dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan bidang kesehatan.

Program kesehatan dasar maupun pengembangan menjadi penting karena antara satu program dengan program yang lain mempunyai keterkaitan dan saling mendukung dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah di bidang kesehatan, Rencana Program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada table T-C.27 terlampir

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Kesehatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.1

**Indikator Kinerja Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode (2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Keterangan
			2019	2020	2021	2022	2023		
1	<b>AKI per 100.000 Kelahiran Hidup</b>	<b>15,7</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	Indikator Tujuan (IKU)
2	<b>AKB per 1000 kelahiran hidup</b>	<b>13,98</b>	<b>10</b>	<b>9,8</b>	<b>9,6</b>	<b>9,4</b>	<b>9,2</b>	<b>9,2</b>	Indikator Tujuan (IKU)
3	<b>Prevalensi Gizi stunting</b>	<b>25%</b>	<b>24%</b>	<b>23%</b>	<b>22%</b>	<b>21%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	Indikator Tujuan (IKU)
4	Persentase Ibu Hamil yang dilayani sesuai Standar	78%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	
5	Persentase ibu bersalin yang dilayani sesuai Standar	79%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	
6	Persentase Bayi Baru	89%	90%	92%	95%	98%	100%	100%	

	Lahir yang dilayani sesuai Standar								
7	Persentase Balita yang mendapat pelayanan gizi sesuai Standar	86%	88%	90%	92%	95%	100%	100%	
8	Persentase Rumah Tangga berPHBS	40,39%	40%	40%	45%	50%	60%	60%	
9	Persentase Desa yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat	40%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Persentase desa STBM	28,15%	32,3%	53,8%	69,2%	84,6%	100%	100%	
11	Persentase TTU yang memenuhi syarat Kesehatan	75	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
12	Persentase TPM yang memenuhi Syarat Kesehatan	31	70%	70%	70%	70%	70%		
13	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
14	Persentase Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

	yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Olah Raga								
15	Persentase orang dengan penyakit Tidak Menular yang dilayani sesuai standar	37%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
16	Persentase Desa bebas KLB Penyakit Menular	89%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
17	Persentase Desa Universal Child Immunization (UCI)	94%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
18	<b>Indeks kepuasan masyarakat</b>	<b>77</b>	<b>81,5</b>	<b>82,9</b>	<b>84,4</b>	<b>85,9</b>	<b>88,31</b>	<b>88,31</b>	Indikator Tujuan (IKU)
19	<b>Indeks Keluarga Sehat</b>	<b>0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	Indikator Tujuan (IKU)
20	Persentase fasilitas Kesehatan yang terakreditasi Utama	11%	21%	37%	47%	58%	68%	68%	
21	Persentase Pelayanan kegawat daruratan oleh Public Service Center (PSC)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	

22	Persentase Fasilitas Kesehatan yang berstatus BLUD	4,7%	4,7%	19%	100%	100%	100%	100%	
23	Persentase Desa dengan IKS katagori Sehat	5%	20%	25%	30%	40%	50%	50%	
24	Persentase Jumlah Kelompok Asuhan Mandiri Tanan Obat Keluarga (Asman TOGA) di Desa.	37%	41%	44%	48%	52%	56%	50%	
25	Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta JKN	6%	38%	100%	100%	100%	100%	100%	
26	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai Standar.	55%	60%	65%	70%	75%	80%	80%	
27	Persentase Puskesmas dengan alat Kesehatan yang standar	79%	84%	89%	95%	100%	100%	100%	
28	Persentase obat dan BMHP yang sesuai Formularium Nasional	83%	85%	87%	90%	92%	100%	100%	

29	persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar	93%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
30	Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran dengan baik dan sesuai aturan	100	100	100	100	100	100	100	
31	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	
32	Persentase Pelayanan Kepegawaian sesuai aturan	100	100	100	100	100	100	100	
33	Persentase Pencatatan dan Pelaporan Keuangan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	
34	Persentase Pencatatan aset sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	
35	Nilai Laporan Akuntabilitas kinerja Pemerintah (LAKIP)	69	70	71	72	73	74	74	

## BAB VIII PENUTUP

Dengan Ridho dan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut tahun 2019-2023 dapat disusun untuk menjawab tantangan pembangunan kesehatan di Kabupaten Tanah Laut yang semakin kompleks dan berlangsung cepat.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut 2019-2023 ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya Dinas Kesehatan dalam kurun waktu lima tahun ke depan, sehingga hasil pencapaiannya terukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusun laporan kinerja tahunan Dinas kesehatan.

Mengingat perubahan situasi dan kondisi yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini dapat dilakukan kajian dan revisi seperlunya.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Rencana strategis ini dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya bila dilaksanakan dengan kerja keras dengan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur kesehatan di lingkup Dinas Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut serta dengan partisipasi masyarakat yang tinggi.

Pelaihari, 23 Agustus 2019

Plt. Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Tanah Laut



Hj. Nina Sandra, SKM, MM  
NIP. 196407101985112002

Tabel T-B.35  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1	Rendahnya Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu masih tinggi	<p>Capaian SPM pelayanan kesehatan keluarga masih rendah</p> <p>Bayi lahir dengan berat badan rendah masih tinggi</p> <p>meningkatnya pernikahan dini,</p>
		Penurunan Prevalensi gizi kurang / stunting belum optimal	<p>Capaian pemantauan gizi masyarakat masih rendah</p> <p>Lemahnya kerja sama Lintas Sektor yang terkait dalam bidang pembangunan kesehatan</p>
		Kurang mandirinya masyarakat dalam penanganan masalah kesehatan.	<p>Capaian Rumah Tangga berperilaku hidup bersih dan sehat masih rendah</p> <p>Rendahnya capaian desa ODF</p>
		Tingginya prevalensi Penyakit menular dan mulai meningkatnya penyakit tidak menular	<p>Capaian SPM Penyakit menular dan tidak menular masih rendah</p> <p>kualitas kesehatan lingkungan rendah ditandai dengan masih tingginya kasus KLB penyakit menular yang disebabkan lingkungan yang buruk.</p>
			<p>Pengawasan obat dan makanan serta tempat tempat umum kurang maksimal.</p> <p>kesadaran masyarakat dalam pencegahan penyakit masih kurang.</p>
		Kualitas pelayanan di Fasilitas pelayanan Kesehatan belum optimal	<p>Hanya 48% Puskesmas terkareitasi.</p> <p>Indeks Kepuasan masyarakat (3,1) nilai belum maksimal.</p> <p>Terbatasnya SDM yang berkompotensi</p> <p>Fasilitas kesehatan yang belum standar sesuai permenkes 75 tahun 2014.</p>
			<p>Sistem informasi kesehatan yang masih lemah dan keterbatasan data</p> <p>Rendahnya kualitas penyelenggaraan SAKIP Daerah</p>

**Tabel T-C.23**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas kesehatan**  
**Kabupaten Tanah laut**

No	Indikator kinerja dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Umur Harapan Hidup		70		69	69,5	69,5	69,75	70	69,11	69,25	69,2	68,76	68,89	100,2	99,6	99,6	98,6	98,4
2	Angka kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup		100		130	112	120,0	110	100	98,45	144	98,0	15,7	15	75,7	128,6	81,7	14,3	15,0
3	Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup		7,5		9,5	9	10,0	10	7,5	12,63	13	14,0	13,98	10,8	132,9	144,4	140,0	139,8	144,0
4	Prevalen Gizi kurang		10		11,20	11,2	10,6	10,4	10	10,52	19,1	13,9	6,9	2,2	93,9	170,5	131,1	66,3	22,0
5	Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	100			100	100	100	100	100	96,39	96	97,61	96,4	83,2	96,4	96,0	97,6	96,4	83,2
6	Cakupan desa/kelurahan UCI	100			100	100	100	100	100	100	96,3	97,8	94,1	94,1	100,0	96,3	97,8	94,1	94,1
7	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	70%			45	50	55	65	70	87,03	48	63,25	38,9	39	193,4	96,0	115,0	59,8	55,7
8	Cakupan desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	48,8			18	22,2	31%	40	48,8	31	22,2	31%	26,7	54	172,2	100,0	100,0	66,8	110,7
9	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	100			75	100	100	100	100	69,29	100	100	70,7	71,8	92,4	100,0	100,0	70,7	71,8
10	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan KLB <24 jam	100%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
11	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan di Kabupaten	100%			70	100	100	100	100	50	100	100	100	100	71,4	100,0	100,0	100,0	100,0
12	Presentase kemajuan Fisik (progres) pembangunan Rumah Sakit tipe D	100%			10	30	50	75	100	8	50	50	50	100	80,0	166,7	100,0	66,7	100,0
13	Presentase Puskesmas yang terakreditasi	61			17	28	33	39	61	16,67	16,67	33	36,8	84	98,1	60,0	99,0	94,5	137,7
14	Presentase balita ditimbang berat badannya (D/S)	85%			60	65	70	75	85	68,31	67,2	77,57	66,24		113,9	103,4	110,8	88,3	0,0
15	Desa siaga aktif	100%			100	100	100	100	100	100	100	100	83,7	82,7	100,0	100,0	100,0	83,7	82,7

No	Indikator kinerja dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
16	Persentase Rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	70			34	43	52	61	70	35,34	48,22	44,6	40,4	46,37	103,9	112,1	85,8	66,2	66,2
17	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional organisasi			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
18	Persentase Puskesmas yang memiliki 5 jenis tenaga kesehatan			65	45	50	55	60	65	38,9	38,9	63	36,8	68	86,4	77,8	114,5	61,3	104,6
19	Presentase desa/ kelurahan yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM			30	0	0	5	15	30	0	0	54,8	85,9	79,25	0,0	0,0	1096,0	572,7	264,2
20	Indeks Kepuasan Masyarakat			4	3,2	3,4	3,6	3,8	4	3,1	3,1	3,1	3,1	3,4	96,9	91,2	86,1	81,6	85,0
21	Cakupan pertolongan persalinan Di Fasilitas Kesehatan			80	60	65	70,0	75	80		61,5	84,2	80,4	94,6	0,0	94,6	120,3	107,2	118,3
22	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pemetaan status gizi Masyarakat			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
23	Persentase desa/Kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa.			0	0	0	0	0	0	3,0	2,2	1	5,2	12,6	97,0	97,8	99,0	94,8	#DIV/0!
24	Cakupan desa/kelurahan ODF (Open Defecation Free)			20	5	5	10	20	20	0	0	0	11,0	11,9	0,0	0,0	0,0	55,0	59,5
25	Persentase kesembuhan pasien rawat inap			95	95	95	95	95	95				97,17	95	0,0	0,0	0,0	102,3	100,0
26	Indeks kepuasan pasien			80	80	80	80	80	80				74,06	80	0,0	0,0	0,0	92,6	100,0
27	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar			100				100	100				95	83,2				95,0	83,2
28	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			100				100	100				36,8	27,1				36,8	27,1
29	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			100				100	100				61,8	75,2				61,8	75,2
30	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			100				100	100				40,4	49				40,4	49,0
31	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			100				100	100				40,8	25,6				40,8	25,6

No	Indikator kinerja dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
32	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan Jiwa Berat			100				100	100				88,8	74,2				88,8	74,2
33	Persentase Pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberculouse			100				100	100				29,7	34,8				29,7	34,8
34	Persentase Pelayanan Kesehatan orang dengan Risiko terinfeksi HIV			100				100	100				2,9	1,16				2,9	1,2
35	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita			100				100	100				69,5	86,7				69,5	86,7
36	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			100				100	100				87,5	97,8				87,5	97,8
37	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			100				100	100				77,2	87,7				77,2	87,7
38	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			100				100	100				80,4	90,8				80,4	90,8

T-C. 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas kesehatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	<b>Meningkatkan status kesehatan masyarakat</b>		Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	15	14	13	11	10
			Angka kematian bayi per 1000 Kelahiran hidup	10	9,8	9,6	9,4	9,2
			Prevalensi Gizi stunting	24%	23%	22%	21%	20%
		<b>Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak serta gizi masyarakat</b>	1. Persentase Ibu Hamil yang dilayani sesuai Standar	80%	85%	90%	95%	100%
			2. Persentase ibu bersalin yang dilayani sesuai Standar	80%	85%	90%	95%	100%
			3. Persentase Bayi Baru Lahir yang dilayani sesuai Standar	90%	92%	95%	98%	100%
			4. Persentase Balita yang mendapat pelayanan gizi sesuai Standar	88%	90%	92%	95%	100%
		<b>Meningkatnya Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat</b>	1. Persentase Rumah Tangga berPHBS	40%	40%	45%	50%	60%
			2. Persentase Desa yang melaksanakan Gerakan Masvarakat Sehat	100%	100%	100%	100%	100%
		<b>Meningkatnya Kesehatan Lingkungan,</b>	1. Persentase desa STBM	32,3%	53,8%	69,2%	84,6%	100%
			2. Persentase TTU yang memenuhi syarat Kesehatan	80%	80%	80%	80%	80%
			3. Persentase TPM yang memenuhi Syarat Kesehatan	70%	70%	70%	70%	70%
		<b>Meningkatnya Kesehatan Kerja dan Olah Raga</b>	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	100%	100%	100%	100%	100%
2	<b>Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan</b>		1. Persentase orang dengan penyakit Tidak Menular yang dilayani sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%
			2. Persentase Desa bebas KLB Penyakit Menular	100%	100%	100%	100%	100%
		<b>Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan</b>	3. Persentase Desa Universal Child Immunization (UCI)	100%	100%	100%	100%	100%
			1. Indeks kepuasan masyarakat	81,5	82,9	84,4	85,9	88,31
			2. Indeks Keluarga Sehat	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
			1. Persentase fasilitas Kesehatan yang terakreditasi Utama	21%	37%	47%	58%	68%
			2. Persentase Pelayanan kegawat daruratan oleh Public Service Center (PSC)	0%	100%	100%	100%	100%
			3. Persentase Fasilitas Kesehatan yang berstatus BLUD	4,7%	19%	100%	100%	100%
			4. Persentase Desa dengan IKS katagori Sehat	20%	25%	30%	40%	50%
			5. Persentase Jumlah Kelompok Asuhan Mandiri Tanan Obat Keluarga (Asman TOGA) di Desa.	41%	44%	48%	52%	56%
			6 . Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta JKN	38%	100%	100%	100%	100%
		<b>Meningkatkan Fasilitas Pelayanan kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>	1. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai Standar.	60%	65%	70%	75%	80%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun ke				
				2019	2020	2021	2022	2023
<b>Meningkatnya pelayanan administrasi dan Dukungan Operasional Perkantoran</b>			2. Persentase Puskesmas dengan alat Kesehatan yang standar	84%	89%	95%	100%	100%
			3. Persentase obat dan BMHP yang sesuai Formularium Nasional	85%	87%	90%	92%	100%
			1. persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar	100%	100%	100%	100%	100%
			1. Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran dengan baik dan sesuai aturan	100	100	100	100	100
			2. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran sesuai standar	100	100	100	100	100
			3. Persentase Pelayanan Kepegawaian sesuai aturan	100	100	100	100	100
			4. Persentase Pencatatan dan Pelaporan Keuangan sesuai standar	100	100	100	100	100
			5. Persentase Pencatatan aset sesuai standar	100	100	100	100	100
			6. Nilai Laporan Akuntabilitas kinerja Pemerintah (LAKIP)	70	71	72	73	74

Tabel T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Tanah Laut yang berinteraksi (Berkarya, Inovasi, Tertata, Relegius, Aktual, Sinergi)			
MISI I : Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak serta gizi masyarakat	Optimalisasi Pelayanan kesehatan primer dibangun dengan mengedepankan upaya kesehatan ibu dan anak, serta untuk mengatasi penyakit-penyakit lain penyebab kematian ibu dan anak.	Penguatan komitmen Lintas Program / Lintas Sektor dalam melaksanakan program kegiatan mengedepankan upaya kesehatan ibu anak dan Keluarga Berencana Peningkatan pelayanan Kesehatan ibu dan anak melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, kunjungan dokter spesialis ke Puskesmas.
		Optimalisasi pengembangan sistem surveilans (pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi serta penyebaran data secara sistematis dan berkelanjutan), monitoring dan evaluasi yang memberdayakan peranan masyarakat lokal	memperkuat sistem surveilans kematian ibu anak serta monitoring secara berkelanjutan
		Optimalisasi penaganan gizi buruk Fokus pada penanggulangan KEK (kekurangan energy kronis) ibu hamil dan gizi kurang/buruk pada balita.	Penanggulangan KEK dan Balita Kurang Gizi memperkuat sistem surveilans kasus gizi buruk, monitoring dan evaluasi serta dilaksanakannya pemetaan status gizi masyarakat
			Memperkuat kelembagaan yang ada dalam pemantauan status gizi masyarakat
	Meningkatnya Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	Optimalisasi kegiatan advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Penguatan Kerjasama Lintas sektor, swasta, LSM yang dapat mendukung pembangunan bidang kesehatan peningkatan penyuluhan melalui media penyuluhan secara konvensional dan elektronik/melalui sosial media Peningkatan Kapasitas/Pelatihan Kader Kesehatan, membuat percontohan desa sehat (PHBS)
	Meningkatnya Kesehatan Lingkungan	Optimalisasi Program kesehatan lingkungan	Penguatan Kerja sama Lintas Sektor dan Program, swasta, LSM. Pembinaan Kelompok Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah raga, Peningkatan Pelayanan Kesehatan olah raga seperti tes kebugaran untuk institusi maupun masyarakat, memanfaatkan Media sosial untuk optimalisasi Penyuluhan dan pemberdayaan Upaya Kesehatan Lingkungan
			Peningkatan peran Puskesmas dalam pencapaian kecamatan/kabupaten Stop Buang Air Besar Sembarang (SBS)
			Peningkatan cakupan TPM Sehat, TTU Sehat dan RS yang melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar
	Meningkatnya Kesehatan Kerja dan Olah raga	Fasilitasi dan Pembinaan kepada Puskesmas untuk melaksanakan kegiatan Upaya Kesehatan Kerja Penyelenggaraan program kesehatan kerja dan olahraga secara bertahap terpadu dan berkesinambungan berdasarkan kebutuhan masyarakat.	Mendorong dan memfasilitasi kepada semua Puskesmas untuk melaksanakan pembentukan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK), Pemberdayaan masyarakat dalam implementasi Kesehatan kerja dan olah raga, Advokasi dan sosialisasi Kesehatan kerja dan olah raga (Pemda, dunia usaha, lintas program, lintas sektor, dll)
	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	optimalisasi Promosi pencegahan, dan pengurangan faktor risiko PTM melalui pemberdayaan masyarakat	Penguatan Advokasi ke penentu kebijakan untuk meningkatkan pendanaan dan multi sektor, peningkatan kerjasama LS dan Pelaksanaan Bimbingan teknis dan manajemen ke Fasilitas pelayanan Kesehatan
			penguatan aktifitas Posbindu PTM
		Optimalisasi pelayanan kesehatan Penyakit tidak menular, serta kolaborasi sektor swasta dan profesional	Peningkatan kapasitas bagi petugas dan kader kesehatan, serta pelaksanaan pemeriksaan PTM melalui kolaborasi swasta dan profesional

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Penguatan surveilans, pengawasan PTM	Meningkatkan Pelaksanaan surveilans faktor risiko PTM yang terintegrasi (melibatkan LS/LSM/Swasta) serta memperkuat aktifitas Posbindu PTM
		Perluasan cakupan akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan terkait penyakit menular.	Peningkatan skrining cepat bila ada dugaan potensi meningkatnya kejadian penyakit menular seperti Mass Blood Survey untuk malaria
		Intensifikasi penemuan kasus Penyakit Menular/Perluasan skrining dan Deteksi Dini Kasus Penyakit Menular	Perluasan skrining, deteksi dini Penyakit menular dengan sasaran ibu hamil, populasi kunci/kelompok masyarakat berisiko tinggi
		Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam membantu upaya pengendalian penyakit	Peningkatan keterlibatan LS/LP/LSM dan masyarakat dalam upaya penemuan/deteksi dini Penyakit Menular dan melalui surveilans berbasis masyarakat untuk melakukan pengamatan terhadap kejadian penyakit menular
		Optimalisasi Pengendalian Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)	Penyelenggaraan Imunisasi dilaksanakan oleh Puskesmas, swasta dan masyarakat, dengan prinsip keterpaduan Peningkatan kualitas pelayanan imunisasi melalui; – Petugas yang terampil – Coldchain dan vaksin yang berkualitas – Pemberian imunisasi yang benar
Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Primer	peningkatan Pembinaan dan kapasitas Puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan Kesehatan primer Mendorong Puskesmas agar lebih aktif dalam melaksanakan kegiatan Kesehatan primer melalui pendekatan keluarga Mendorong Puskesmas agar mampu melaksanakan pelayanan pengobatan alternatif melalui pelayanan kesehatan tradisional yang bermutu dan berkualitas
		Optimalisasi pelayanan kesehatan Rujukan.	Peningkatan Pembinaan dan monitoring Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah maupun swasta Mendorong dan memfasilitasi semua fasilitas Pelayanan Kesehatan agar terakreditasi Madya Meningkatkan pelayanan Kesehatan Tanggap Bencana Bagi Masyarakat (termasuk Pelayanan Kesehatan on Call) Memberikan Pelayanan pembiayaan dan jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum masuk keanggotaan BPJS
	Meningkatkan Fasilitas Pelayanan kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Menjamin Fasilitas Pelayanan Kesehatan masyarakat yang merata dan bermutu	Menyediakan dukungan kefarmasian/ obat-obatan/bahan medis habis pakai dan alat kesehatan serta pemeliharaan/kalibrasi alat kesehatan Peningkatan Fasilitas Kesehatan dengan Membangun/mengadakan/memperbaiki, meningkatkan mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan termasuk sarana dan prasarana secara merata dan sesuai standar kesehatan yang berlaku Meningkatkan kapasitas dan pemerataan Sumber daya manusia kesehatan
	Meningkatnya Administrasi dan Dukungan Operasional Perkantoran	Menjamin meningkatnya Pelayanan Administrasi perkantoran dan dukungan operasional perkantoran	Menjamin dukungan manajemen dan operasional fasilitas pelayanan kesehatan

Tabel T. 27  
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan  
Kabupaten Tanah laut

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan (2018)	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah		Unit Kerja Perangkat daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			DINAS KESEHATAN				145.871.284.349		209.006.350.000		227.470.410.000		244.747.950.000		271.473.400.000		1.050.741.467.133		
Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak menular	1	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Persentase pelayanan orang dengan penyakit Tidak Menular		100%	127.417.500									100%	127.417.500		
			Screening/ deteksi dini penyakit tidak menular	Jumlah deteksi dini RF PTM (HT, DM, IVA, Sadanis)		13.500 orang	127.417.500									13.500 orang	127.417.500		
		2	Program Jamkesmas	Persentase kepesertaan JKN		100%	18.000.000.000									100%	18.000.000.000		
	Meningkatnya mutu pelayanan dan Fasilitas Pelayanan		Jaminan kesehatan masyarakat di puskesmas dan jaringannya	Jumlah peserta JKN		160.916 jiwa	18.000.000.000									160.916 jiwa	18.000.000.000		
		3	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase obat dan BMHP yang sesuai Formularium Nasional		85%	3.144.420.000	87%	121.070.000	90%	133.170.000	92%	146.490.000	100%	161.140.000	100%	3.706.290.000		
			Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah pengadaan obat dan BMHP		2 jenis	3.158.424.000									2 jenis	3.158.424.000		
			Pembinaan, distribusi obat dan perbekalan kesehatan	jumlah lokasi distribusi obat		19 puskesmas	110.060.000	19 puskesmas	121.070.000	19 puskesmas	133.170.000	19 puskesmas	146.490.000	19 puskesmas	161.140.000	19 puskesmas	671.930.000		
	Meningkatnya mutu pelayanan dan Fasilitas Pelayanan	4	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Desa dengan IKSe katagori Sehat		5% 20%	21.169.040.000	25	218.500.000	30	229.430.000	40	240.900.000	50	252.940.000	50%	25.738.440.000		
			Peningkatan kapasitas pelayanan krisis kesehatan dan SPGDT PCS 199	Jumlah Pelayanan Kesehatan Tanggap Bencana Bagi Masyarakat		150 lokasi	297.859.500									150 lokasi	297.859.500		
			Pelayanan dan pembiayaan kesehatan masyarakat	Jumlah masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan dasar		187.872 orang	40.340.712.000									187.872 orang	40.340.712.000		
			Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan usia produktif	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan program Kesehatan usia produktif		19 puskesmas	27.000.000									19 puskesmas	27.000.000		
			Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah	Jumlah penemuan penderita penyakit menular langsung serta penyakit tular vektor dan zoonosis		7.263 kasus	39.999.600									7.263 kasus	39.999.600		
			Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan	Jumlah Jenis pengadaan alkes PMI		6 Jenis	2.181.000.000									6 Jenis	2.181.000.000		
			Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan	Jumlah Jenis pengadaan alkes		4 jenis	900.000.000									4 jenis	900.000.000		
			Peningkatan kesehatan masyarakat	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan PIS PK		19 puskesmas	4.072.299.000									19 puskesmas	4.072.299.000		
			Peningkatan dan pengembangan kesehatan kerja dan olah raga	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dan olah raga		19 puskesmas	35.100.000									19 puskesmas	35.100.000		
			Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana	Jumlah lokasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan pengungsi korban bencana		20 kegiatan	56.247.750									20 kegiatan	56.247.750		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan (2018)	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah		Unit Kerja Perangkat daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan program pengembangan kesehatan		19 puskesmas	85.500.000									19 puskesmas	85.500.000		
			Pendamping Penyelenggaraan Jamkesmas	Jumlah orang yang mendapat pelayanan Jamkesmas		45.868 org	45.000.000									45.868 org	45.000.000		
			Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan peralatan standar		19 puskesmas	135.045.000									19 puskesmas	135.045.000		
			Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	Jumlah desa STBM		27 desa	308.536.750									27 desa	308.536.750		
			Peningkatan pelayanan kesehatan remaja dan UKS	Jumlah sekolah yang mendapat Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar		135 sekolah	105.750.000									135 sekolah	105.750.000		
			Pelayanan pengobatan gratis pasien kelas III	Jumlah orang dengan pengobatan gratis		8.750 Jiwa	10.000.000.000									8.750 Jiwa	10.000.000.000		
			Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium Kesehatan	Jumlah sampel yang diperiksa		2500 sampel	208.098.000	2500 sampel	218.500.000	2500 sampel	229.430.000	2500 sampel	240.900.000	2500 sampel	252.940.000	12500 sampel	1.149.868.000		
Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak menular	5	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Desa bebas KLB Penyakit Menular	89%	100%	31.050.000										13%	31.050.000		
			Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Jumlah insfeksi kesehatan makanan minuman		5.021 buah	31.050.000									5.021 buah	31.050.000		
																	-		
Meningkatnya Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	6	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	40%	40%	845.196.000										35%	845.196.000		
			Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat (Dana KTR)	Jumlah Promosi Kesehatan dengan Berbagai media		22 macam	514.500.000									22 macam	514.500.000		
			Penyaluhan masyarakat pola hidup sehat (Dana KTR)	Jumlah Rumah tangga berPHBS		2.750	83.061.000									2.750	83.061.000		
			Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan	Jumlah desa siaga aktif		135 desa	56.245.500									135 desa	56.245.500		
			Peningkatan kemitraan bagi upaya kesehatan berbasis masyarakat	Jumlah pembinaan Kelompok kemitraan dengan UKBM (saka bhakti Husada)		1 kel	191.389.500									1 kel	191.389.500		
Meningkatnya status gizi masyarakat	7	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	prevalensi balita stunting	25,0%	24,0%	270.651.000										10%	270.651.000		
			Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	Jumlah dokumen informasi kurang gizi		1 dokumen	9.765.000									1 dokumen	9.765.000		
			Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Jumlah Balita dan bumil mendapat PMT		232 orang	179.409.000									232 orang	179.409.000		
			Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	Jumlah Bumil KEK dan balita gizi kurang yang ditangani		232	60.102.000									232	60.102.000		
																	-		
																	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan (2018)	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah		Unit Kerja Perangkat daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Jumlah kader pendamping Kadarzi		28 orang	21.375.000									28 orang	21.375.000		
																	-		
Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak menular	8	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase Desa bebas KLB Penyakit Menular	89%	100%	479.666.700										0%	479.666.700		
			Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Jumlah Penyemprotan / Fogging (Pengaspalan)		75 fokus	135.000.000									75 fokus	135.000.000		
			Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Jumlah penemuan penderita penyakit menular langsung (TB, HIV, Kusta, ISPA, Diare, Prambusia) dan penyakit Tular Vektor dan Zonesis lainnya		7.616 kasus	84.999.600									7.616 kasus	84.999.600		
			Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik	Jumlah penemuan penderita penyakit menular langsung (TB, HIV, Kusta, ISPA, Diare, Prambusia) dan penyakit Tular Vektor dan Zonesis lainnya		7.616 kasus	29.415.600									7.616 kasus	29.415.600		
			Peningkatan imunisasi	Jumlah Balita yang diberikan Imunisasi dasar lengkap		7.019 balita	125.343.000									7.019 balita	125.343.000		
			Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	Jumlah Penyelidikan Epidemiologi dan penanggulangan KLB		14 kejadian	104.908.500									14 kejadian	104.908.500		
																	-		
Meningkatnya mutu pelayanan dan Fasilitas Pelayanan	9	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas yang terakreditasi Utama	11%	21%	815.400.000										21%	815.400.000		
			Pengumpulan data kematian CRVS(Civil registration dan vital statistic)	Jumlah Kematian di masyarakat di data		1.000 kematian	34.650.000									1.000 kematian	34.650.000		
			Penyusunan standar pelayanan kesehatan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi utama		2 fasyankes	517.608.000									2 fasyankes	517.608.000		
			Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Jumlah dokumen evaluasi		1 dokumen	225.000.000									1 dokumen	225.000.000		
			Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Jumlah dokumen pemutakhiran data pelayanan kesehatan yang disusun sesuai standar		2 dokumen	13.720.500									2 dokumen	13.720.500		
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen pelaporan yang disusun sesuai standar		12 buah	24.421.500									12 buah	24.421.500		
Meningkatnya mutu pelayanan dan Fasilitas Pelayanan	10	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	Indeks Kepuasan Masyarakat	77	81,5	4.050.123.000										3,2	4.050.123.000		
Kesehatan.			Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas, puskesmas pembantu dan jaringannya	Jumlah pengadaan Sarana dan prasarana		18 buah	3.316.320.000									18 buah	3.316.320.000		
			Pemeliharaan Rutin / Berkala pusling	Jumlah Pusling		38 buah	733.803.000									38 buah	733.803.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan (2018)	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah		Unit Kerja Perangkat daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak	11	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	AKB		10,0	102.150.000									10,0	102.150.000			
			Peningkatan kapasitas petugas dalam perawatan anak balita	Jumlah pembinaan Kualitas Pelayanan Program Kes Anak		19 puskesmas	102.150.000									19 puskesmas	102.150.000			
	Meningkatnya Pengendalian Penyakit menular dan tidak menular	12	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	persentase desa/ kelurahan mengalami KLB Penyakit Menular	13%	0	28.300.500										28.300.500			
			Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	Jumlah Tempat Pengelola Makanan yang ikut pelatihan Higiene sanitasi Makanan		40 buah	28.300.500									40 buah	28.300.500			
	Meningkatnya mutu pelayanan dan Fasilitas Pelayanan kesehatan.	13	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paruparu/ rumah sakit mata	Indeks Kepuasan Masyarakat	77	81,5	22.542.456.526									85%	22.542.456.526			
			Pembangunan rumah sakit	Jumlah Pembangunan Rumah Sakit		1	11.479.310.000									1	11.479.310.000			
			Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	Jumlah jenis		22	1.914.045.326									22	1.914.045.326			
			Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit	Jumlah Pengolahan limbah padat dan cair		2 unit	2.700.000.000									2 unit	2.700.000.000			
			Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah Jenis pengadaan alat kesehatan rumah sakit		5	3.600.000.000									5	3.600.000.000			
			Pengadaan ambulance/mobil jenazah	Jumlah ambulance		1	540.000.000									1	540.000.000			
			Pengadaan mebeuleur rumah sakit	Jumlah Jenis Meubeler		5	270.000.000									5	270.000.000			
			Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	Jumlah jenis perlengkapan Rumah Tangga		5	686.700.000									5	686.700.000			
			Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Jumlah Jenis bahan logistik		2	720.000.000									2	720.000.000			
			Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit	Jumlah jenis percetakan dan surat		15	270.000.000									15	270.000.000			
			Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase desa/Kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa.		100%	41.925.600									100%	41.925.600			
			Kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	Jumlah kerjasama dengan institusi (kemitraan dalam pencegahan penyakit menular)		3 buah	41.925.600									3 buah	41.925.600			
		14	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		60%	88.200.000									60%	88.200.000			
			Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan Usila		19 puskesmas	88.200.000									19 puskesmas	88.200.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan (2018)	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah		Unit Kerja Perangkat daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		15	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Persentase pelayanan Kesehatan anak Balita; Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir; Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup		100%	102.150.000									100%	102.150.000			
			Kegiatan .....																	
Meningkatnya mutu pelayanan dan Fasilitas Pelayanan kesehatan.	16	Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paruparupu/ rumah sakit mata	Indeks Kepuasan Masyarakat	77	81,5	675.000.000	82,9	1.708.750.000	84,4	1.789.630.000	85,9	2.067.590.000	88,31	2.274.350.000	88,31	8.515.320.000				
	rs	Pemeliharaan rutin / berkala alat-alat kesehatan Rumah Sakit	Jumlah jenis Peralatan yang dipelihara		161	675.000.000	161	1.708.750.000	183	1.789.630.000	220	2.067.590.000	244	2.274.350.000	244	8.515.320.000				
Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak	17	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Angka Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran Hidup	15	15	245.763.000										16	245.763.000			
			Angka Kematian Bayi Per 1000 kelahiran hidup	10,00	10											89	-			
			Peningkatan kapasitas petugas dalam penanganan ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas dan KB	Jumlah Pertolongan persalinan sesuai standar		5.431 bulin	110.763.000									5.431 bulin	110.763.000			
			Jumlah Akseptor KB Baru			7.685 peserta										7.685 peserta	-			
			Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit dan rujukan	Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai izin		42 fasyankes	67.500.000									42 fasyankes	67.500.000			
																	-			
Meningkatnya mutu pelayanan dan Fasilitas Pelayanan kesehatan.	18	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP		80%	64.679.900										100%	64.679.900			
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan		1 dokumen	12.029.900										1 dokumen	12.029.900			
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen		1 dokumen	18.000.000										1 dokumen	18.000.000			
		Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen		1 dokumen	18.900.000										1 dokumen	18.900.000			
		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen		1 dokumen	15.750.000										1 dokumen	15.750.000			
Meningkatnya mutu pelayanan dan Fasilitas Pelayanan kesehatan.	19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan Kesehatan		100%	24.099.950										100%	24.099.950			
		Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun sesuai standar		3 dokumen	24.099.950										3 dokumen	24.099.950			
		Lingkungan Hidup															-			
Meningkatnya Pengendalian Penyakit menular dan tidak menular	20	Program pengembangan dan peningkatan kawasan tanpa rokok	Persentase Rumah Tangga berPHBS	38,00%	40%	1.878.065.000	40%	1.878.070.000	45%	2.065.870.000	50%	2.272.460.000	60%	2.499.700.000	60%	10.594.165.000		PTM		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan (2018)	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah		Unit Kerja Perangkat daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp										
			Pengembangan kawasan tanpa rokok (Dana KTR)	Jumlah Rumah Tangga berPHBS		19 puskesmas	1.878.065.000	2.905	1.878.070.000	3.250	2.065.870.000	3.500	2.272.460.000	3.900	2.499.700.000	3.900	10.594.165.000		PTM
Meningkatnya mutu pelayanan dan Fasilitas	21	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	5. Persentase Pencatatan aset sesuai standar	100%	100%	51.300.000										100%	51.300.000		
		Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Jumlah dokumen		6 dokumen	51.300.000										6 dokumen	51.300.000		
Meningkatnya mutu pelayanan dan Fasilitas	22	Program pendidikan kedinasanku	Persentase Tenaga Kesehatan yang berkompетensi	0%	100%	282.032.910										45%	282.032.910		
		Peningkatan keterampilan dan profesionalisme	Jumlah peserta Diklat		50 org	282.032.910										50 org	282.032.910		
																-			
Meningkatnya mutu pelayanan dan Fasilitas Pelayanan kesehatan.	23	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Persentase Pelayanan Kepegawaian sesuai aturan		100%	81.000.000										100%	81.000.000		
		Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis	Jumlah pembinaan ASN dan pengembangan aparatur sesuai standar kepegawaian		633 org	81.000.000										633 org	81.000.000		
Meningkatnya mutu pelayanan dan Fasilitas Pelayanan	24	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	5. Persentase Pencatatan aset sesuai standar	100%	100%	54.000.000										100%	54.000.000		
		Penyusunan tabulasi data aset tetap	Jumlah dokumen pencatatan aset yang disusun sesuai standar		1 dokumen	54.000.000										1 dokumen	54.000.000		
Meningkatnya mutu pelayanan dan Fasilitas	25	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran sesuai standar		100,0	4.537.945.147										3,2	4.537.945.147		
		pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan		1 buah	352.000.000										1 buah	352.000.000		
		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Jenis		10 jenis	509.665.522										10 jenis	509.665.522		
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung		30 buah	3.106.279.625										30 buah	3.106.279.625		
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas		4 unit	420.000.000										4 unit	420.000.000		
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah gedung		21 jenis	150.000.000										21 jenis	150.000.000		
		Non Urusan														-			
Meningkatnya mutu pelayanan dan Fasilitas	26	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran dengan baik dan sesuai aturan	100,0	100,0	12.898.550.000	100,0	41.188.870.000	100,0	43.281.200.000	100,0	45.483.900.000	100,0	54.021.730.000	100,0	196.874.250.000			
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis		3 jenis	9.068.468.250										3 jenis	9.068.468.250		
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah orang		6 org	60.826.500										6 org	60.826.500		
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis		49 jenis	858.120.500										49 jenis	858.120.500		
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis		2 jenis	177.299.900										2 jenis	177.299.900		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis		6 jenis	697.006.000										6 jenis	697.006.000		
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Jenis		26 jenis	114.847.900										26 jenis	114.847.900		
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah eksemplar		12 eks	8.000.000										12 eks	8.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan (2018)	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah		Unit Kerja Perangkat daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp										
			Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang		1.588 org	54.000.000									1.588 org	54.000.000		
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah sppd		150 sppd	831.250.000									150 sppd	831.250.000		
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	jumlah sppd		60 sppd	40.338.000									60 sppd	40.338.000		
	rs		Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	Jumlah orang		379	18.688.294.160	383	21.235.562.970	387	22.297.341.119	390	23.412.208.174	394	29.292.818.583	394	114.926.225.006		Keu
	rs		Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Jumlah Jenis penyediaan jasa, bahan dan perlengkapan kantor. (Listrik, air Komunikasi, peralatan, perlengkapan kantor, cetak, penggandaan, ATK, (peralatan rumah tangga, buku peraturan/perundangan dan makan minum)			17.893.060.030	9 jenis	17.893.060.030	9 jenis	18.717.587.181	9 jenis	19.578.792.956	9 jenis	21.986.722.660	9 jenis	96.069.222.857		Umpeg
	rs		Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	Jumlah penyediaan Rapat koordinasi Dalam/luar daerah				150 sppd	2.060.247.000	150 sppd	2.266.271.700	150 sppd	2.492.898.870	150 sppd	2.742.188.757	150 sppd	9.561.606.327		Prenc
Meningkatnya mutu pelayanan dan fasilitas Pelayanan kesehatan.	27	<b>Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD</b>	<b>Persentase Fasilitas Kesehatan yang berstatus BLUD</b>	5%	5%	51.546.127.216	19%	59.278.050.000	100%	65.169.750.000	100%	69.195.220.000	100%	74.574.500.000	100%	268.217.520.000			
	rs	Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan	Jumlah Jenis Pengadaan Sarpras		5 jenis	51.546.127.216	12681 jiw	59.278.050.000	13181	65.169.750.000	13681	69.195.220.000	14181	74.574.500.000		319.763.647.216			
																169			
Meningkatnya mutu pelayanan dan fasilitas Pelayanan	28	<b>Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan</b>	<b>Indeks kepuasan masyarakat</b>	77	81,5	18.000.000	82,9	18.900.000	84,4	21.850.000	85,9	20.840.000	88,31	21.880.000	88,31	101.470.000			
		Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Jumlah dokumen MOU dengan mitra asuransi		1 dokumen	18.000.000	1 dokumen	18.900.000		21.850.000		20.840.000		21.880.000	1 dokumen	101.470.000			
Meningkatnya mutu pelayanan dan fasilitas Pelayanan kesehatan.	29	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	<b>Indeks kepuasan masyarakat</b>	77	81,5	338.540.000									88,31	338.540.000			
		Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Jumlah sistem informasi rumah sakit		2 Unit	338.540.000									2 Unit	338.540.000			
Meningkatnya mutu pelayanan dan fasilitas Pelayanan	30	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase tenaga Kesehatan yang berkompetensi</b>	45%	100%	270.000.000									45%	270.000.000			
		Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah orang		77 org	270.000.000									57 org	270.000.000			
		31	<b>Program Peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan</b>			67.500.000									67.500.000				
		Kegiatan.....													-				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan (2018)	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah		Unit Kerja Perangkat daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak	32	<b>Program Pembinaan, Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Keluarga , Masyarakat dan Lingkungan</b>	<b>Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup</b>	15,0	15	0	14	<b>1.598.010.000</b>	13	<b>1.757.810.000</b>	11	<b>1.933.590.000</b>	10	<b>2.126.950.000</b>	10	7.416.360.000		Kesga
				<b>Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup</b>	10,0	10		9,8		9,6		9,4		9,2		9,2	-		
				<b>Prevalensi Gizi Stunting</b>	25,0%	24%		23%		22%		21%		20%		20%	2,2 % ???		
				<b>Persentase Rumah Tangga berPHBS</b>	40,0%	40%		40%		45%		50%		60%		60%			
				<b>Persentase desa STBM</b>	28,15%	32,3%		53,8%		69,2%		84,6%		100%		100%			
Meningkatnya status gizi masyarakat	Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat		Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	6.500	6.500		6.600	483.564.000	6.650	531.920.400	6.675	585.112.440	6.700	643.623.684	6700	2.244.220.524		Kesga	
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin				6.600		6.650		6.675		6.700		6700	-		Kesga	
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita	26.000	26.000		26.500		27.000		27.500		28.500		28500	-		Kesga	
			Jumlah balita gizi kurus (wasting) dan Bumil KEK mendapat Makanan Tambahan dan vitamin	1.545	1.545		1.545		1.450		1.400		1.350		1350	-		kesga	
Meningkatnya Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	Pembinaan, Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah jenis penyediaan media Promosi Kesehatan	22	22		22	886.449.400	22	975.093.340	22	1.072.601.674	22	1.179.862.841	22	4.114.007.255		Promkes	
			Jumlah Rumah Tangga berPHBS	2.905	2.905		2.905		3.250		3.500		3.900		3.900	-		Promkes	
			Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar	146.136	146.136		146.136		146.136		146.136		146.136		146.136	-		Promkes	
			Pembinaan dan Pemberdayaan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Jumlah Pengawasan TPM/IRT	5.021	5.021		5.021	227.996.600	5.021	250.796.260	5.021	275.875.886	5.021	303.463.475	5.021	1.058.132.221		KLKKOR
			Jumlah desa STBM	122	122		122		128		135		135		135	-		KLKKOR	
			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah raga	12	12		12		15		19		19		19	-		KLKKOR	
	rs	1.	Kegiatan penyelenggaraan penyehatan lingkungan	Jumlah Pengawasan Kualitas lingkungan rumah sakit				12 Dok	500.000.000		550.000.000		605.000.000		665.500.000		2.320.500.000		
Meningkatnya mutu pelayanan dan Fasilitas Pelayanan kesehatan	33	<b>Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan</b>	<b>Persentase Puskesmas yang terakreditasi Utama</b>	5%	11%		16%	<b>81.514.110.000</b>	26%	<b>89.775.520.000</b>	37%	<b>98.293.070.000</b>	53%	<b>108.122.380.000</b>	53%	<b>377.705.080.000</b>			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan (2018)	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah		Unit Kerja Perangkat daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				<i>Persentase Pelayanan kegawat daruratan oleh Public Service Center (PSC)</i>	0%	20%		30%		50%		55%		60%		60%			
				<i>Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta JKN</i>	6%	38%		100%		100%		100%		100%		100%	-		
				<i>Indeks Keluarga Sehat</i>	0%	0,8		0,8		0,8		0,8		0,8		0,8			
				<i>Indeks kepuasan masyarakat</i>	77	81,5		82,9		84,4		85,9		88,31		88,31			
			Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	Jumlah keluarga mendapat pelayanan kesehatan melalui pendekatan keluarga		53.510		53.510	4.013.750.500	58.861	4.415.124.550	58.861	4.856.635.005	64.747	5.342.301.506	64.747	18.627.811.561		Primer
				Jumlah Lokasi Pelayanan Kesehatan Tanggap Bencana Bagi Masyarakat		7		8		9		10	-	10	-	44	-		Primer
			Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan standarisasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah fasilitas Kesehatan yang terakreditasi Utama				3	900.000.000	5	1.100.000.000	7	750.000.000	10	825.000.000	10	3.575.000.000		Rujukan
				Jumlah Dokumen Rencana Peningkatan Puskesmas Perawatan Kurau menjadi RSUD kelas D				1		3				1					
			Peningkatan kapasitas pelayanan krisis kesehatan dan SPGDT PCS 199	Jumlah orang Penanganan Krisis Kesehatan dan Public Service Center (PSC) 119 (termasuk pelayanan on call)				90	297.859.500	100	327.645.450	120	360.409.995	200	396.450.995	200	1.382.365.940		Rujukan
	rs	Pembinaan, Pelayanan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Jumlah kepesertaan JKN			334.359	76.302.500.000	334.359	83.932.750.000	334.359	92.326.025.000	334.359	101.558.627.500	334.359	354.119.902.500			JKN	
rs			1. Peningkatan pelayanan Medik dan Non Medik														31.302.500.000		
			2. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Jumlah evaluasi pelayanan kesehatan				48 kali	300.000.000	48 kali	330.000.000	48 kali	363.000.000	48 kali	399.300.000	48 kali	1.392.300.000		
			3. Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Jumlah laporan hasil kemitraan asuransi kesehatan				1 dok	90.000.000	1 dok	99.000.000	1 dok	108.900.000	1 dok	119.790.000	1 dok	417.690.000		
Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak menular	34	<i>Program Pencegahan, Pengendalian dan penanggulangan Penyakit</i>	<i>Cakupan Desa UCI</i>	94,1%	100%		100%	<b>913.860.000</b>	100%	<b>959.550.000</b>	100%	<b>1.007.530.000</b>	100%	<b>1.057.910.001</b>	100%	<b>3.938.850.001</b>			
			<i>persentase desa/kelurahan Bebas KLB Penyakit Menular</i>	13%	0%		100%		100%		100%		100%		100%	-			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan (2018)	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah		Unit Kerja Perangkat daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				<i>Persentase pelayanan orang dengan penyakit Tidak Menular (Hipertensi dan DM)</i>	41%			100%		100%		100%		100%		100%	-		
			Peningkatan Imunisasi, surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	Jumlah desa UCI				129	304.901.100	130	320.143.155	132	336.152.813	133	352.963.954.388	133	1.314.161.022		Imunisasi
				Jumlah desa KLB yang ditanggulangi				15		12	-	11	-	9	-	9	-		Imunisasi
			Pencegahan, penanggulangan dan Pengendalian Penyakit Menular	Jumlah penemuan penderita penyakit menular langsung (Pnemonia, diare, TB, HIV, )				9.180	291.341.400	9.180	305.908.470	9.180	321.203.894	9.180	337.264.088	9.180	1.255.717.852		P2M
				Jumlah Penemuan Penderita penyakit Tular vektor dan zoonosis				505		510		515		520		520	-		P2M
			Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Jumlah deteksi dini RF PTM (HT, DM, IVA, Sadanis)				13.500	317.617.500	13.500	333.498.375	13.500	350.173.294	13.500	367.681.958	13.500 orang	1.368.971.127		PTM
																	169		
Meningkatnya mutu pelayanan dan Fasilitas Pelayanan kesehatan	35	<i>Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (Kefarmasan dan Alat Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan)</i>	Indeks Kepuasan Masyarakat	77	81,5		82,9	13.949.570.000	84,4	14.965.770.000	85,9	16.064.650.000	88,31	17.253.540.000	88,31	62.233.530.000			
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai Standar	55%	60%		65%		70%		75%		80%		80%				
			Persentase Puskesmas dengan alat Kesehatan yang standar	79%	84%		89%		95%		100%		100%		100%				
			Persentase obat dan BMHP yang sesuai Formularium Nasional	83%	85%		87%		90%		92%		100%		100%				
			persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar	93%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
			Kegiatan Pembinaan, Pengembangan Kefarmasan dan Alat Kesehatan	Jumlah Jenis Pengadaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai				2 Jenis	6.374.469.000	2 Jenis	7.011.915.900	2 Jenis	7.713.107.490	2 Jenis	8.484.418.239	2 Jenis	29.583.910.629		Alkes
				Jumlah Jenis Pengadaan Alat Kesehatan				5 Jenis		5 Jenis	-	5 Jenis	-	5 Jenis	-	5 Jenis	-		Alkes
				Jumlah jenis alat kesehatan yang dikalibrasi				5 Jenis		5 Jenis	-	5 Jenis	-	5 Jenis	-	5 Jenis	-		Alkes

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan (2018)	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah		Unit Kerja Perangkat daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Kegiatan Pembinaan, pemeliharaan dan Pengembangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengadaan gedung fasilitas kesehatan				13	7.293.065.000	15	7.657.716.300	16	8.040.597.820	15	8.442.629.836	72	31.434.008.956		Fasyankes
				Jumlah luas pembebasan tanah utk RSUD kelas D Kurau (m <sup>2</sup> )						3.000	4.000.000.000								
				Jumlah Pemeliharaan fasilitas pelayanan kesehatan				222		222	-	222	-	222	-	222	-		Puskesmas
			Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti uji berkompetensi				60	282.036.000	70	296.137.800	87	310.944.690	90	326.491.925	90	1.215.610.415		SDK
	rs	1.	Peningkatan mutu asuhan keperawatan	Jumlah Pembuatan dokumen audit keperawatan, mutu dan keselamatan pasien di rawat inap dan rawat jalan				2 Dok	178.593.850	2 Dok	196.453.235	2 Dok	206.275.897	2 Dok	216.589.692		797.912.673		
	rs		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Jumlah Pelatihan / bimtek bagi karyawan				87 org	310.500.000	97 org	341.550.000	107 org	358.627.500	117 org	376.558.875		1.387.236.375		
Meningkatnya mutu pelayanan dan Fasilitas Pelayanan kesehatan	36	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Kepuasan Masyarakat	77	81,5		82,9	5.401.000.000	84,4	5.941.100.000	85,9	6.535.210.000	88,31	7.503.730.000	88,31	25.381.040.000			
			Persentase Sarana Prasarana Perkantoran sesuai standar	100%	100%		100%			100%		100%		100%		100%			
			Persentase Pelayanan Kepegawaian sesuai aturan	100%	100%		100%			100%		100%		100%		100%			
	rs	Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah jenis pengadaan dan penyediaan sarana prasarana perkantoran				9 Jenis	3.200.000.000	9 Jenis	3.520.000.000	9 Jenis	3.872.000.000	9 Jenis	4.259.199.000	19	14.851.199.000			
	rs	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Jumlah Jenis Pemeliharaan sarana prasarana perkantoran				2 jenis	2.120.000.000	2 jenis	2.332.000.000	2 jenis	2.565.200.000	2 jenis	2.821.720.000	50	9.838.920.000		Umpeg	
	rs	Pembangunan gedung kantor	Jumlah penambahan Gedung (RSUD)				1 buah	5.000.000.000	1 buah	6.000.000.000	1 buah	7.200.000.000	1 buah	8.640.000.000	1 buah	26.840.000.000			
	rs	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung yang direhabilitasi		0		0						2	150.000.000	2	150.000.000			
		Peningkatan kemampuan teknis aparatur	Jumlah ASN				863	81.000.000	863	89.100.000	863	98.010.000	863	107.811.000	863	375.921.000		Umpeg	
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah ASN				863	0	-	-			900	315.000.000	863	315.000.000		Umpeg	
Meningkatnya mutu pelayanan dan Fasilitas Pelayanan kesehatan	37	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	LAKIP	69%	70%		71%	286.010.000	72%	287.300.000	73%	304.670.000	74%	323.270.000	74%	1.201.250.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan (2018)	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah		Unit Kerja Perangkat daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
				Persentase Pencatatan dan Pelaporan Keuangan sesuai standar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
				Persentase Pencatatan aset sesuai standar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%				
		rs	Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang dibuat sesuai standar				2	30.000.000	2	31.500.000	2	33.075.000	2	34.728.750	2	129.303.750		Prenc	
		rs	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan yang sesuai standar				3	187.868.000	3	180.843.800	3	189.143.180	3	197.844.248	3	755.699.228		Prenc	
		rs	Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja	Jumlah dokumen pelaporan yang sesuai standar				2	68.142.000	2	74.956.200	2	82.451.820	2	90.697.002	2	316.247.022		Prenc	
	Meningkatnya mutu pelayanan dan Fasilitas Pelayanan	38	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	77	81,5		82,9	25.000.000	84,4	50.000.000	85,9	50.000.000	88,31	50.000.000	88,31	175.000.000			
			Pelaksana Kegiatan Pameran Pembangunan	Jumlah Kegiatan Pameran				1	25.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	115.000.000			
			Pembuatan Sistem Informasi SKPD	Jumlah sistem informasi yang dibuat/dipelihara				1	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	60.000.000			
																	-			
	Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak menular	39	Program Pembinaan dan Pengembangan Desa	Persentase Rumah Tangga berPHBS	40%	40%		40%		45%		50%		60%		60%		-		
			Kegiatan Pembinaan dan Pemicuan Desa Pelangi Sehat	Jumlah KK ber PHBS		-	-	-		45		60		80		80		-		
																	-			
	Meningkatnya mutu pelayanan dan Fasilitas Pelayanan	40	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat																
			Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah Jenis Alat Kesehatan														-		
		rs	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	Jumlah Jenis Perlengkapan Rumah tangga													-			
	Meningkatnya mutu pelayanan dan Fasilitas Pelayanan kesehatan.	41	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Indeks kepuasan masyarakat	77,0												90.570.000			
			Kegiatan Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Jumlah dokumen MOU dengan mitra asuransi													-			
			42																	
			43	Program Informasi Kesehatan Medik	Indeks kepuasan masyarakat	77	81,5	1042460000	82,9	906.580.000	84,4	1.042.460.000	85,9	1.131.830.000	88,31	1.229.380.000	88,31	5.352.710.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada tahun Awal Perencanaan (2018)	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat daerah		Unit Kerja Perangkat daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		rs	1. Pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Rekam Medik	Jumlah dokumen Informasi rumah sakit		1 dok	1.042.460.000	1 dok	623.080.000	1 dok	744.785.000	1 dok	819.271.250	1 dok	901.193.312		4.130.789.562		
		rsk	2. Pengadaan cetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit	Jumlah Jenis Percetakan dan surat				1	283.500.000	1	297.675.000	1	312.558.750	1	328.186.688	5	1.221.920.438		

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023		
1	Angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	15,7	15	14	13	11	10	11	IKU
2	Angka kematian bayi per 1000 Kelahiran hidup	13,98	10	9,8	9,6	9,4	9,2	9,4	IKU
3	Prevalensi Gizi stunting	25%	24%	23%	22%	21%	20%	21%	IKU
4	Persentase Ibu Hamil yang dilayani sesuai Standar	78%	80%	85%	90%	95%	100%	95%	
5	Persentase ibu bersalin yang dilayani sesuai Standar	79%	80%	85%	90%	95%	100%	95%	
6	Persentase Bayi Baru Lahir yang dilayani sesuai Standar	89%	90%	92%	95%	98%	100%	98%	
7	Persentase Balita yang mendapat pelayanan gizi sesuai Standar	86%	88%	90%	92%	95%	100%	95%	
8	Persentase Rumah Tangga berPHBS	40,39%	40%	40%	45%	50%	60%	50%	
9	Persentase Desa yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat	40%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Persentase desa STBM	28,15%	32,3%	53,8%	69,2%	84,6%	100%	84,6%	
11	Persentase TTU yang memenuhi syarat Kesehatan	75	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
12	Persentase TPM yang memenuhi Syarat Kesehatan	31	70%	70%	70%	70%	70%		
13	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah raga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
14	Persentase orang dengan penyakit Tidak Menular yang dilayani sesuai standar	37%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
15	Persentase Desa bebas KLB Penyakit Menular	89%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
16	Persentase Desa Universal Child Immunization (UCI)	94%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
17	Indeks kepuasan masyarakat	77	81,5	82,9	84,4	85,9	88,31	88,31	IKU
18	Indeks Keluarga Sehat		0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	IKU
19	Persentase fasilitas Kesehatan yang terakreditasi Utama	11%	21%	37%	47%	58%	68%	58%	
20	Persentase Pelayanan kegawat daruratan oleh Public Service Center (PSC)	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	
21	Persentase Fasilitas Kesehatan yang berstatus BLUD	4,7%	4,7%	19%	100%	100%	100%	100%	
22	Persentase Desa dengan IKS katagori Sehat	5%	20%	25%	30%	40%	50%	40%	
23	Persentase Jumlah Kelompok Asuhan Mandiri Tanan Obat Keluarga (Asman TOGA) di Desa	37%	41%	44%	48%	52%	56%	50%	
24	Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta JKN	6%	38%	100%	100%	100%	100%	100%	
25	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai Standar.	55%	60%	65%	70%	75%	80%	75%	

NO	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Ket
			2019	2020	2021	2022	2023		
26	Persentase Puskesmas dengan alat Kesehatan yang standar	79%	84%	89%	95%	100%	100%	100%	
27	Persentase obat dan BMHP yang sesuai Formularium Nasional	83%	85%	87%	90%	92%	100%	92%	
28	persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar	93%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
29	Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran dengan baik dan sesuai aturan	100	100	100	100	100	100	100	
30	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	
31	Persentase Pelayanan Kepegawaian sesuai aturan	100	100	100	100	100	100	100	
32	Persentase Pencatatan dan Pelaporan Keuangan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	
33	Persentase Pencatatan aset sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	
34	Nilai Laporan Akuntabilitas kinerja Pemerintah (LAKIP)	69	70	71	72	73	74	73	





















X	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan				43.800.000	20.000.000			29.611.750	8.819.500					44,10	31.900.000	14.805.875	
1	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat				43.800.000	20.000.000			29.611.750	8.819.500					44,10	31.900.000	14.805.875	
					-				0,00						#DIV/0!	-	-	
XI	<b>Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan</b>				<b>53.098.901.946</b>	<b>53.098.901.946</b>			<b>51.741.695.278,00</b>	<b>24.586.485.552</b>					46,30	53.098.901.946	25.870.847.639	
1	Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pendukung Pelayanan				<b>53.098.901.946</b>	<b>53.098.901.946</b>			<b>51.741.695.278,00</b>	<b>24.586.485.552</b>					46,30	53.098.901.946	25.870.847.639	
XII	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>				<b>310.423.720</b>	<b>44.269.000</b>			<b>280.600.160</b>	<b>111.908.000</b>					252,79	177.346.360	140.300.080	
1	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi				310.423.720	44.269.000			280.600.160	11.293.000					25,51	177.346.360	140.300.080	
XIII	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>				38.200.000	<b>34.920.000</b>			20.239.250	3.684.500					10,55	36.560.000	10.119.625	
1	Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) SKPD				38.200.000	34.920.000			20.239.250	3.684.500					10,55	36.560.000	10.119.625	
					-				-	-					#DIV/0!	-	-	
									0,00						#DIV/0!	-	-	
	<b>JUMLAH</b>	<b>26.087.639.625</b>	<b>39.492.598.330</b>	<b>54.174.731.248</b>	<b>314.106.030.764</b>	<b>266.644.685.110</b>	<b>21.706.839.242</b>	<b>31.795.259.272</b>	<b>50.780.390.006</b>	<b>291.367.273.709</b>	<b>81.710.446.185</b>	<b>83,21</b>	<b>80,51</b>	<b>93,73</b>	<b>92,76</b>	<b>30,64</b>	<b>140.101.137.015</b>	<b>98.912.440.557</b>

BUPATI TANAH LAUT



H. SUKAMTA